



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2025 - 2029

An aerial photograph of a cityscape, featuring a large, modern apartment complex with multiple towers in the foreground. The complex is surrounded by greenery and parking areas. In the background, other city buildings and a distant horizon under a cloudy sky are visible.

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2025-2029

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan.

Sebagai Kementerian yang baru terbentuk, kami memahami bahwa tantangan dalam mewujudkan visi-misi presiden dan wakil presiden, khususnya dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman yang layak, membutuhkan komitmen, inovasi, serta kerjasama yang solid dari berbagai pihak.

Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri PKP Nomor 14 Tahun 2025 tentang Renstra Kementerian PKP Tahun 2025-2029. Di dalam Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029, memuat tujuan, sasaran dan arah kebijakan dan strategi target, indikator kinerja, serta kerangka pendanaan, sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal.

Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029 merupakan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung tugas Sekretariat Jenderal yaitu menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian. Selain itu, Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai acuan untuk penjabaran ke dalam rencana kegiatan unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dalam rangka mewujudkan tata kelola Kementerian PKP yang efektif, efisien, dan transparan.

Renstra Sekretariat Jenderal memuat pendahuluan yang berisi kondisi umum dan potensi permasalahan, tujuan dan sasaran, arah kebijakan dan strategi,



kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan. Pada bagian lampiran, terdapat matriks kinerja dan pendanaan yang menggambarkan program, kegiatan, beserta dengan targetnya pada tahun 2025-2029; metode perhitungan; dan matriks kerangka regulasi.

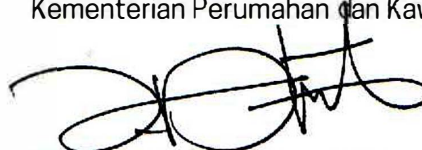
Renstra Sekretariat Jenderal bertujuan untuk memastikan tercapainya dukungan pada tujuan strategis Kementerian PKP dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat serta mendukung pencapaian program-program nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Selain itu, Renstra ini akan mengarahkan penguatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal, memperkuat sistem informasi, serta meningkatkan koordinasi dan sinergi antara unit kerja untuk mempercepat realisasi program-program yang telah ditetapkan. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal dapat berjalan dengan lebih terstruktur, terukur, dan berdampak positif bagi pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia.

Akhir kata, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kekuatan untuk dapat bersama-sama mewujudkan cita-cita mempercepat peningkatan jumlah rumah tangga di Indonesia yang menghuni rumah layak.

Jakarta, 19 Desember 2025

Sekretaris Jenderal

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman



Didyk Choiroel, S.Sos., M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Kondisi Umum.....	3
I.2 Potensi dan Permasalahan	9
BAB II TUJUAN DAN SASARAN	16
II.1 Tujuan Sekretariat Jenderal	18
II.2 Sasaran Program Sekretariat Jenderal	18
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	23
III.1 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal	25
III.2 Kerangka Regulasi	29
III.3 Kerangka Kelembagaan	30
III.3.1 Tugas, Kedudukan, dan Fungsi	30
III.3.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)	36
III.4 Pengarusutamaan Pembangunan	44
III.4.1 Gender dan Inklusi Sosial.....	44
III.4.2 Pembangunan Berkelanjutan	45
III.4.3 Transformasi Digital.....	45
III.4.4 Pembangunan Rendah Karbon	45
III.4.5 Pembangunan Berketahanan Iklim.....	46
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	47
IV.1 Target Kinerja	51
IV.2 Kerangka Pendanaan	57
BAB V PENUTUP	58
LAMPIRAN 1 MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN	60
LAMPIRAN 2 METODE PERHITUNGAN	67
LAMPIRAN 3 MATRIKS KERANGKA REGULASI	97



DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Capaian Kinerja Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Perumahan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Tahun 2024	5
Tabel II. 1	Tingkatan Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen Kementerian PKP	17
Tabel III.1	Tugas dan Fungsi Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian PKP	33
Tabel IV. 1	Target Kinerja untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program Tahun 2025 – 2029	51
Tabel IV. 2	Rincian Target Kinerja untuk Indikator Kinerja Kegiatan	54
Tabel IV. 3	Indikasi Kebutuhan Pendanaan Sekretariat Jenderal Kementerian PKP 2025-2029 per Kegiatan.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1	Capaian Kinerja Program Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Tahun 2020-2024	4
Gambar I. 2	Capaian Kinerja Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Perumahan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Tahun 2020-2024	7
Gambar I. 3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Tahun 2020-2024	8
Gambar II. 1	Peta Strategi Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029	22
Gambar III.1	Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian PKP	32
Gambar III.2	Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian PKP	36
Gambar III.3	Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian PKP berdasarkan Unit Kerja	36
Gambar III.4	Komposisi Pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian PKP Berdasarkan Jenis Kelamin.....	37
Gambar III.5	Komposisi PNS Sekretariat Jenderal Berdasarkan Jabatan	38
Gambar III.6	Komposisi PNS Sekretariat Jenderal Berdasarkan Eselonisasi	39
Gambar III.7	Komposisi PNS Sekretariat Jenderal Kementerian PKP Berdasarkan Golongan...	39
Gambar III.8	Komposisi PPPK Sekretariat Jenderal Kementerian PKP Berdasarkan Golongan..	40
Gambar III.9	Komposisi Non PNS Sekretariat Jenderal Kementerian PKP Berdasarkan Golongan	40
Gambar III.10	Komposisi Pegawai Sekretariat Jenderal PKP Berdasarkan Bidang Pendidikan	41
Gambar III.11	Komposisi Pegawai Sekretariat Jenderal Berdasarkan Tingkat Pendidikan	42
Gambar III.12	Komposisi Pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian PKP Berdasarkan Usia	43



BAB I
PENDAHULUAN



Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan turunan dari Renstra Kementerian PKP Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri PKP Nomor 14 Tahun 2025 tentang Renstra Kementerian PKP Tahun 2025-2029. Secara umum, penyusunan Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian PKP Tahun 2025-2029 juga merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian PKP berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal. Selain hal tersebut, dokumen Renstra

juga menunjukkan peran aktif Sekretariat Jenderal Kementerian PKP dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Kementerian PKP periode tahun 2025 sampai dengan 2029.

Bab I menyajikan kondisi umum Sekretariat Jenderal Kementerian PKP yang merupakan penggambaran atas capaian Direktorat Jenderal Perumahan Tahun 2020-2024. Selanjutnya pada Bab I juga memaparkan secara komprehensif mengenai potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Jenderal Kementerian PKP, dimana potensi dan permasalahan yang disusun telah melalui proses analisa dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan serta potensi dan tantangan yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal Sekretariat Jenderal.

I.1 Kondisi Umum

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) adalah Kementerian baru yang dibentuk tahun 2024 pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam era kabinet Merah Putih periode 2024–2029. Memiliki peran strategis di bidang Penyediaan Rumah Layak Huni dan kawasan permukiman yang terpadu bagi masyarakat, Kementerian PKP mengemban tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian PKP yang disahkan pada tanggal 8 November 2024.

Urusan perumahan sendiri telah melalui beberapa perubahan struktur organisasi, pada tahun 2014 urusan perumahan digabungkan dengan Kementerian Pekerjaan Umum sehingga menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, di bawah Direktorat Jenderal Perumahan. Saat ini, Kementerian PKP mengemban tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perumahan, sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat

Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada kementerian sebelumnya.

Pada awal berdirinya, Kementerian PKP turut berkontribusi dalam mengimplementasikan langkah efisiensi yang signifikan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dan memastikan alokasi yang lebih tepat sasaran. Pemerintah menargetkan efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun yang terdiri dari Rp256,1 triliun dari Kementerian dan Lembaga negara, serta Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah. Efisiensi ini menyasar pada penggunaan Alat Tulis Kantor (ATK) penghematan hingga 90%, Perjalanan Dinas penghematan 53,9%, Kegiatan Seremonial penghematan 56,9%, Sewa Gedung, Kendaraan, dan Peralatan penghematan 73,3%, Pengadaan Peralatan dan Mesin penghematan 28%, Kajian dan Analisis penghematan 51,5%, serta Jasa Konsultan penghematan 45,7%. Sementara itu, belanja

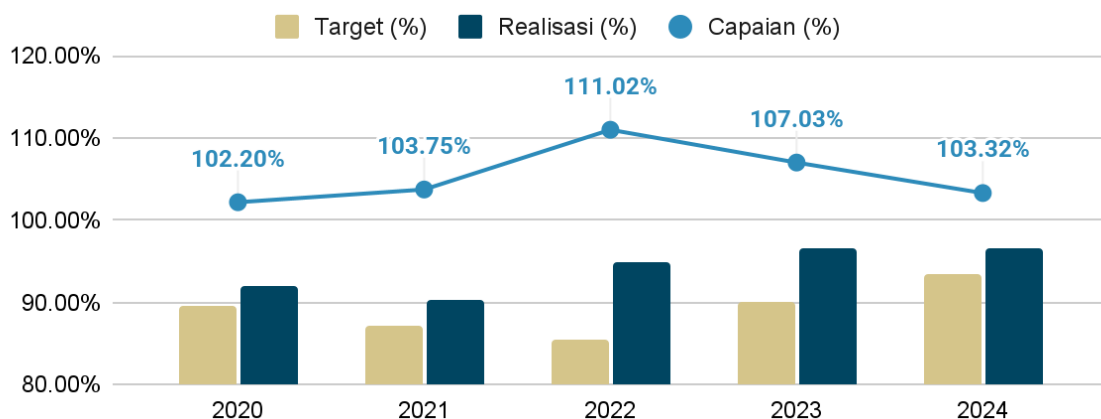


untuk bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan gaji pegawai tetap menjadi prioritas dan tidak termasuk dalam target efisiensi.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian PKP tetap menekankan bahwa efisiensi yang dilakukan tidak akan mengganggu program dan kegiatan yang langsung berdampak pada masyarakat. Perubahan metode pelaksanaan dilakukan sebagai upaya penyesuaian, sehingga target kinerja tetap akan tercapai dengan baik. Beberapa upaya yang dilaksanakan Sekretariat Jenderal antara lain adalah pelaksanaan rapat digital dengan bantuan aplikasi berbasis *Internet of Things (IoT)* yang memungkinkan pegawai untuk mengadakan pertemuan dengan lebih efisien dan menghindari konflik jadwal antar tim, selain itu dilakukan penerapan *smart office* dengan penerapan fleksibilitas *working space* dan juga penerapan *e-office* PKP yang dapat diakses pada *eoffice.pkp.go.id* dimana

digunakan pembuatan hingga proses tanda tangan elektronik untuk mempercepat proses administrasi dan memudahkan kolaborasi lintas unit kerja.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kondisi umum menggambarkan pencapaian organisasi sebelumnya yaitu Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2020–2024, dimana urusan perumahan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, selama periode 2020-2024, capaian kinerja Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Tahun 2020-2024 terhadap Target Jangka Menengah Renstra adalah 94,04% dengan target 89,18% sehingga terdapat deviasi positif 4,87%. Berikut merupakan capaian kinerja program dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Tahun 2020-2024:



Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Tahun 2024, diolah 2025



Gambar I.1 Capaian Kinerja Program Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Tahun 2020-2024

Capaian kinerja kegiatan dukungan manajemen di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan tahun 2020–2024 berdasarkan rencana strategis yaitu tahun 2020 sebesar 91,89 dengan target 89,69; tahun 2021 sebesar 90,33 dengan target 87,06; tahun 2022 94,99 dengan target 85,56; dan tahun 2023 sebesar 96,53 dengan target 90,19.

Selanjutnya capaian kinerja Dukungan Manajemen penyelenggaraan perumahan tahun

2024 yang telah dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan telah merealisasikan tingkat efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan perumahan sebesar 96,48% dari target sebesar 93,38% atau memperoleh capaian kinerja sebesar 103,32%. Berikut merupakan pendetailan dari capaian kinerja tingkat efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan perumahan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Tahun 2024.

Tabel I.1 Capaian Kinerja Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Perumahan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Tahun 2024

No.	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Selisih	Capaian
Tingkat efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan perumahan		93,38%	96,48%	3,10%	103,32%
1	Tingkat penatausahaan Barang Milik Negara	70,00%	91,52%*	21,52%	130,74%
2	Tingkat kinerja pelaksanaan anggaran	93,00%	87,94%**	-5,06%	94,56%
3	Tingkat penatausahaan barang persediaan bencana	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
4	Tingkat layanan pembentukan produk hukum	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
5	Tingkat layanan advokasi hukum	98,00%	100,00%	2,00%	102,04%
6	Tingkat layanan komunikasi publik	96,00%	96,84%	0,84%	100,88%
7	Tingkat layanan pengelolaan kelembagaan, jabatan fungsional dan pengadministrasian pegawai	95,00%	95,60%	0,60%	100,63%
8	Tingkat kualitas pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas, kearsipan dan pengelolaan ketatausahaan	95,00%	99,93%	4,93%	105,19%

*Status progres serah terima: 31 Desember 2024

**Status nilai IKPA: 9 Januari 2025 (09.00 WIB)

Sumber: Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Perumahan Tahun 2024

Capaian sasaran tingkat efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan perumahan tahun 2024, meliputi indikator kinerja sebagai berikut:

1. Tingkat penatausahaan Barang Milik Negara terdiri atas (1) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan, (2) Penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Perumahan, dan (3) Penatausahaan Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Perumahan, mendapatkan realisasi 91,52% (status progres serah terima 31 Desember 2024) dengan target 70% sehingga mencapai deviasi positif 21,52%, capaiannya menjadi 130,74%;
2. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri atas (1) Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan, (2) Penyusunan Laporan Keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan, (3) Pembinaan Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan, (4) Konsolidasi dan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit pada Direktorat Jenderal Perumahan, (5) Dukungan Pelaksanaan Anggaran dan Peningkatan Nilai IKPA, (6) Penyelenggaraan SPIP, MR Direktorat Jenderal Perumahan dan Sekretariat Jenderal Perumahan, serta (7) Implementasi AKIP Sekretariat Jenderal

Perumahan, mendapatkan realisasi 87,94% (status nilai IKPA 9 Januari 2025, 09.00 WIB) dengan target 93,00% sehingga terdapat deviasi negatif (-5,06%) dengan capaian 94,56%;

3. Tingkat Penatausahaan Barang Persediaan Bencana mendapatkan realisasi 100% dengan target 100%, sehingga capaiannya menjadi 100%. Penilaian ini berdasarkan indikator Administrasi Umum dan Penanganan Tanggap Darurat dan Kebutuhan mendesak;
4. Tingkat layanan pembentukan produk hukum dengan indikator (1) Pembinaan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perumahan, dan (2) Penyusunan dan Evaluasi Produk Hukum Bidang Perumahan dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, mendapatkan realisasi 100% dengan target 100%, sehingga capaiannya menjadi 100%;
5. Tingkat layanan advokasi hukum dengan indikator pendampingan dan penanganan hukum bidang perumahan dan penguatan kerja sama kelembagaan bidang perumahan, mencapai realisasi 100% dengan target 98,00% mendapatkan deviasi positif sebanyak 2,00%, sehingga capaiannya menjadi 102,04%;

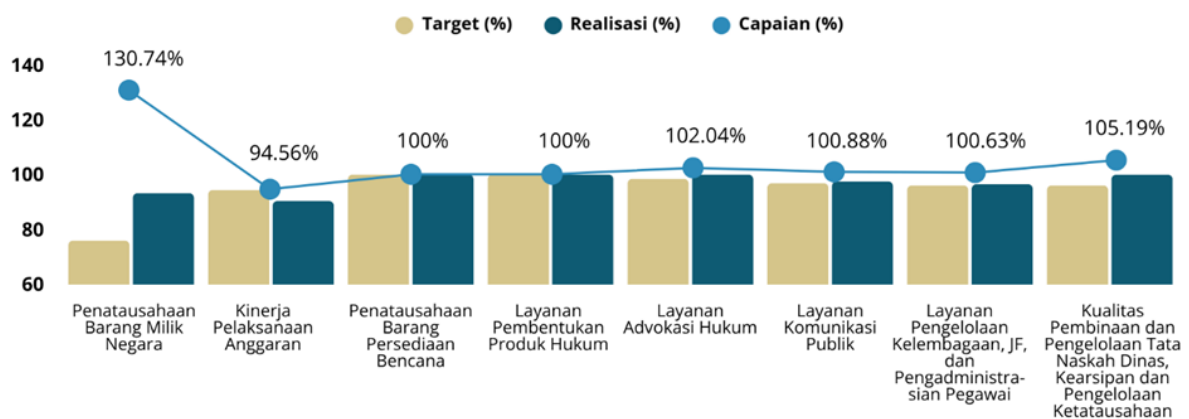


6. Tingkat layanan komunikasi publik dengan indikator publikasi data dan informasi bidang penyediaan perumahan, mencapai realisasi 96,84% dengan target 96,00% mendapatkan deviasi positif 0,84%, sehingga capaiannya menjadi 100,88%;
7. Tingkat layanan pengelolaan kelembagaan, jabatan fungsional, dan pengadministrasian pegawai dengan indikator (1) Pelaksanaan tata usaha kepegawaian Direktorat Jenderal Perumahan, (2) Dukungan Implementasi Pelaksanaan Jabatan Fungsional (JF) Perumahan, (3) Peningkatan Kapasitas Pegawai Direktorat Jenderal Perumahan, dan (4) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perumahan, mencapai

realisasi 95,60% dengan target 95,00% mendapatkan deviasi positif 0,60%, sehingga capaiannya menjadi 100,63%;

8. Tingkat kualitas pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas, kearsipan, dan pengelolaan ketatausahaan dengan indikator pelaksanaan kearsipan dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan, mencapai realisasi 99,93% dengan target 95,00% mendapat deviasi positif 4,93%, sehingga capaiannya sebesar 105,19%.

Berikut merupakan grafik capaian kinerja tingkat efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan perumahan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Tahun 2020-2024.

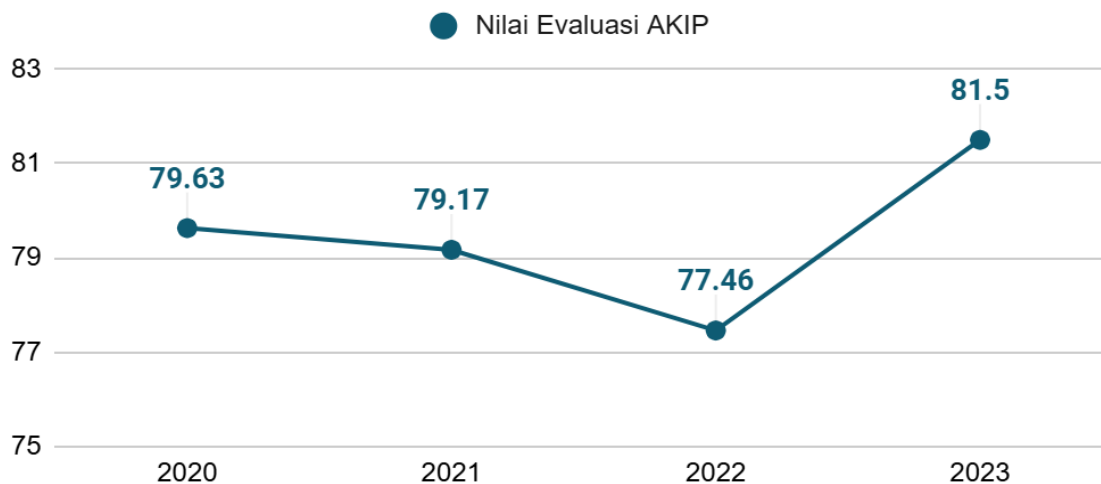


Sumber: Laporan Kinerja Setditjen Perumahan Kementerian PUPR Tahun 2024, diolah, 2025

Gambar I.2 Capaian Kinerja Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Perumahan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Tahun 2020-2024

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR terhadap Direktorat Jenderal Perumahan pada tahun 2023 yang dituangkan dalam Surat Inspektur Jenderal Nomor: PW0204-Ij/822 tanggal 5 Juli 2024 hal Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi AKIP Direktorat Jenderal Perumahan Tahun 2023, nilai akhir yang didapatkan adalah 81,15 atau memperoleh predikat A atau Memuaskan. Komponen yang dinilai antara

lain adalah (1) Perencanaan Kinerja dengan hasil evaluasi 25,50, (2) Pengukuran Kinerja dengan hasil evaluasi 24,60, (3) Pelaporan Kinerja dengan hasil evaluasi 12,30, serta (4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan hasil evaluasi 18,75. Evaluasi AKIP Tahun 2023 mengalami peningkatan dari penilaian tahun sebelumnya, yaitu 79,63 (Predikat BB/Sangat Baik) pada tahun 2020; 79,17 (Predikat BB/Sangat Baik) pada tahun 2021; serta 77,46 (Predikat BB/Sangat Baik) pada tahun 2022 seperti grafik berikut.



Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Tahun 2023, diolah, 2025

Gambar I.3 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Tahun 2020-2024



I.2 Potensi dan Permasalahan

Dalam rangka penyelenggaraan tugas penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta dalam menjalankan fungsinya, Sekretariat Jenderal Kementerian PKP senantiasa dihadapkan pada tantangan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Sekretariat Jenderal Kementerian PKP dituntut untuk mampu beradaptasi dan selalu menghadirkan inovasi dalam mendukung setiap pelaksanaan tugas di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Jenderal Kementerian PKP perlu mengidentifikasi potensi dan permasalahan sebagai acuan dalam menyusun strategi sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian PKP.

Potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Jenderal Kementerian PKP pada periode 2025–2029 dapat dikelompokkan ke dalam 5 (lima) bidang, yaitu: (1) Perencanaan dan Kerja Sama, (2) Organisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), (3) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), (4) Sistem Informasi dan Komunikasi Publik, serta (5) Umum, Hukum dan

Pengadaan Barang Jasa. Berikut uraian potensi yang dapat dikembangkan serta permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PKP:

A. Perencanaan dan Kerja Sama

Potensi:

- 1) Nilai penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah meraih kategori BB. Pencapaian ini mencerminkan adanya integrasi yang semakin baik antara sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, yang berjalan selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dengan penguatan berkelanjutan pada aspek tata kelola dan peningkatan kualitas implementasi sistem, instansi memiliki peluang besar untuk meningkatkan nilai SAKIP di masa mendatang dan mendorong terciptanya budaya kinerja yang lebih akuntabel dan transparan.
- 2) Harmonisasi mekanisme pemantauan yang berkontribusi terhadap tersedianya data yang lebih akurat dan terverifikasi dalam mengukur capaian pembangunan maupun renovasi perumahan dan kawasan permukiman, khususnya yang dilaksanakan oleh pihak mitra.



- 3) Optimalisasi sumber pendanaan alternatif di sektor perumahan menjembatani kesenjangan antara keterbatasan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan target *output* pembangunan yang telah ditetapkan oleh kementerian. Pemanfaatan berbagai instrumen pembiayaan, seperti pinjaman luar negeri, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), *Green Sukuk*, serta skema pembiayaan inovatif lainnya, berpotensi memberikan dukungan tambahan yang signifikan dalam percepatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
- 4) Kolaborasi lintas sektor yang terus dilakukan sebagai bagian dari strategi pembangunan sektor perumahan yang inklusif dan berkelanjutan. Kerja sama yang dibangun mencakup berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, sektor swasta, hingga masyarakat sipil yang dilakukan dengan alur yang jelas, tertib, dan teratur. Sinergi antar pemangku kepentingan ini dipandang sangat penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung penyediaan hunian layak, terjangkau, dan ramah lingkungan. Dengan pendekatan kolaboratif ini, diharapkan berbagai tantangan dalam penyediaan perumahan dapat diatasi secara lebih efektif dan berkelanjutan.
- 5) Pelaksanaan pertemuan serta partisipasi aktif dalam berbagai forum Kerja Sama Internasional memiliki potensi strategis sebagai wadah untuk memperluas jalinan kerja sama teknik dengan mitra luar negeri. Forum-forum ini tidak hanya membuka peluang pertukaran informasi dan keahlian, tetapi juga berperan penting dalam mendukung peningkatan kapasitas pembiayaan dan pengembangan sumber daya manusia di sektor perumahan dan kawasan permukiman. Melalui pemanfaatan forum internasional secara optimal, instansi memiliki peluang untuk memperkuat posisi dalam jejaring global, mengadopsi praktik-praktik terbaik internasional, serta mendorong akselerasi pembangunan melalui kerja sama lintas negara yang berkelanjutan.
- 6) Potensi kolaborasi dan pembelajaran kelembagaan, khususnya dengan organisasi sebelumnya yang telah memiliki Unit Kerja dan UPT Pengadaan Barang/Jasa. Hubungan kelembagaan yang telah terbentuk membuka peluang untuk transfer pengetahuan, pendampingan teknis, dan penguatan kapasitas kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian PKP.
- 7) Kemitraan dan kolaborasi antar instansi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Komunikasi dan Digital



(Komdigi), Kementerian PPN/Bappenas, dan instansi pemerintah lainnya dalam rangka integrasi data sektoral bidang perumahan ke dalam sistem nasional dan memperkuat peran dalam kerangka pelaksanaan Satu Data Indonesia.

Permasalahan:

- 1) Pelaksanaan kegiatan pertemuan dan forum kerja sama internasional menghadapi beberapa faktor penghambat, seperti perbedaan kepentingan antarnegara, isu kedaulatan, dinamika kondisi politik, perbedaan regulasi, serta terbatasnya sumber daya yang tersedia dalam mendukung penyelenggaraan kerja sama internasional. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya pencapaian tujuan dan hasil yang diharapkan dari forum-forum kerja sama tersebut.
- 2) Minimnya minat investor untuk memberikan pendanaan di sektor perumahan menjadi salah satu tantangan dalam upaya pemenuhan kebutuhan hunian layak. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain dinamika perubahan kondisi ekonomi global, hingga ketidakpastian kebijakan. Akibatnya, investor cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan dukungan pendanaan, termasuk melalui skema pinjaman luar negeri yang berdampak pada terbatasnya

alternatif pembiayaan pembangunan perumahan.

B. Organisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Potensi:

- 1) Tersedianya sistem pengelolaan SDM yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN sebagai dasar pengelolaan yang objektif dan profesional.
- 2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di 19 wilayah yang mencakup seluruh Indonesia merupakan langkah strategis yang berpotensi memperkuat pelaksanaan komunikasi dan pelayanan publik Kementerian PKP di tingkat regional. Keberadaan UPT ini membuka peluang untuk mendekatkan layanan kementerian kepada masyarakat, serta memastikan penyampaian informasi program dan kebijakan secara lebih cepat, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing.
- 3) Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Instansi sebesar 90,27% (A-), berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Reformasi Birokrasi Tahun 2024 Nomor B/145/RB.06/2025, berpotensi mendorong keberhasilan indikator kinerja yang menunjukkan birokrasi bersih, akuntabel, efektif, efisien, serta pelayanan publik dengan predikat Sangat Baik (Kategori A).

Permasalahan:

- 1) Belum tersedianya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang akan menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal. Tidak tersedianya NSPK tersebut mengakibatkan belum adanya acuan yang jelas dan terpadu dalam menjalankan fungsi dan tugas di bidang terkait, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan operasional serta menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan organisasi.
- 2) Keterbatasan jumlah pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan organisasi. Jumlah pegawai yang tidak seimbang dengan beban kerja menyebabkan penurunan efektivitas dan efisiensi, terutama pada posisi strategis dan fungsional tertentu. Distribusi ASN juga belum merata di seluruh Unit Kerja maupun Wilayah Kerja Kementerian PKP. Dari sisi kompetensi pegawai, secara umum telah terdapat pegawai yang kompeten, akan tetapi terdapat kesenjangan dalam ketersediaan jumlah pegawai yang memiliki keahlian khusus. Hal ini memperlebar kesenjangan antara kebutuhan dan kemampuan yang ada. Selanjutnya, hal tersebut berpotensi menghambat pencapaian target dan sasaran organisasi secara optimal.

C. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)**Potensi:**

- 1) Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan secara berturut-turut sejak Tahun 2020 hingga 2024 mencerminkan komitmen kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Pencapaian ini menjadi modal penting yang berpotensi untuk terus ditingkatkan melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas pelaporan keuangan, serta konsistensi dalam penerapan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Keberhasilan mempertahankan opini WTP juga membuka peluang strategis bagi kementerian untuk memperoleh kepercayaan lebih besar dari para pemangku kepentingan.
- 2) Pemberlakuan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) berpotensi meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penatausahaan dan pengawasan serta pengendalian dalam pengelolaan BMN.
- 3) Hingga akhir tahun 2024, tercatat telah dilakukan pemindahtanganan aset melalui skema hibah dan alih status sebesar Rp 38,2



Triliun atau mencapai 86,85% dari total target yang mencakup aset Rumah Susun, Rumah Khusus, serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU).

- 4) Terdapat aset yang memiliki potensi menjadi sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di antaranya adalah Rumah Susun Sewa (Rusunawa) yang diperuntukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
- 5) Terdapat aset lahan potensial yang dapat dijadikan sumber penyediaan lahan dalam pemenuhan penyediaan rumah, baik yang bersumber dari aset sitaan maupun hibah dari pihak lain.
- 6) Kontribusi dalam mendukung pencapaian Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menunjukkan perkembangan yang positif dan berkelanjutan. Hal ini tercermin dari hasil penjaminan kualitas yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap penilaian mandiri, khususnya pada komponen Struktur dan Proses, yang memperoleh skor 4,22 pada Tahun 2023 dan meningkat signifikan menjadi 4,63 pada Tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan penguatan tata kelola internal yang konsisten serta komitmen terhadap implementasi SPIP secara efektif. Dengan capaian tersebut, terdapat potensi besar untuk mencapai level maturitas yang lebih tinggi, serta memperkuat akuntabilitas dan manajemen

risiko dalam pelaksanaan program perumahan ke depan.

Permasalahan:

Terhambatnya penyelesaian serah terima aset yang disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Aset yang tidak lagi ditemukan fisiknya yang mempersulit proses penghapusan karena memerlukan data dukung berupa titik koordinat dan dokumentasi fisik bangunan.
- b. Belum lengkapnya dokumen internal dan eksternal yang dipersyaratkan untuk hibah atau alih status.
- c. Penerima hibah tidak bersedia menandatangani Surat Kesediaan Menerima Hibah, Naskah Hibah, atau Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah.

D. Sistem Informasi dan Komunikasi Publik

Potensi:

- 1) Tersedianya dukungan teknologi informasi seperti Sistem Informasi ASN (SIASN) untuk mempercepat transformasi digital SDM.
- 2) Digitalisasi pelayanan publik di lingkungan Kementerian PKP memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta keterjangkauan akses layanan bagi masyarakat. Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, layanan publik dapat dikembangkan menjadi lebih responsif, terintegrasi, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan



masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil atau dengan keterbatasan fisik akses.

- 3) Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi berupa server berperforma tinggi, jaringan internet yang stabil, perangkat penyimpanan data, serta berbagai perangkat lunak pengelolaan basis data. Teknologi informasi ini menjadi fondasi utama dalam mendukung digitalisasi layanan data dan pengembangan sistem informasi sektoral.
- 4) Media sosial Kementerian PKP memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan sebagai kanal strategis dalam penyebaran informasi publik. Dengan daya jangkauan yang luas dan kemampuannya menjangkau berbagai kalangan masyarakat secara *real time*, media sosial dapat menjadi sarana efektif untuk menyampaikan program, kebijakan, serta capaian kementerian secara transparan.

Permasalahan:

- 1) Fragmentasi data yang tersebar di berbagai unit kerja tanpa dukungan integrasi sistem yang baik, dapat mengakibatkan terjadinya duplikasi, inkonsistensi informasi, serta lemahnya interoperabilitas antar sistem. Kondisi ini pada akhirnya menghambat proses penyusunan data yang utuh, akurat, dan menyeluruh.

- 2) Proses pengembangan sistem informasi saat ini masih belum sepenuhnya mandiri, dimana masih ada ketergantungan pada pengembang eksternal. Hal ini dapat berdampak pada terbatasnya penguasaan teknis internal, keterlambatan dalam proses pemutakhiran sistem, serta risiko keberlanjutan jangka panjang dari aplikasi yang dikembangkan.

E. Umum, Hukum dan Pengadaan Barang Jasa

Potensi:

- 1) Terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Kementerian/Lembaga yang baru, menjadi momentum yang tepat untuk melakukan simplifikasi peraturan perundang-undangan yang akan menjadi rujukan pelaksanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selanjutnya sebagai Kementerian yang fokus pada urusan perumahan dan kawasan permukiman, manajemen pelayanan advokasi hukum dapat lebih responsif dan efisien.
- 2) Peraturan perundang-undangan yang telah didokumentasikan dan dipublikasikan secara transparan, dikelola secara digital, dan dapat diakses sebagai sumber informasi rujukan pegawai di lingkungan



Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

- 3) Momentum program prioritas nasional berupa target pembangunan 3 (tiga) juta rumah memberikan dorongan politik dan kelembagaan yang signifikan untuk percepatan reformasi sistem pengadaan barang/jasa. Target ini menempatkan pengadaan barang/jasa sebagai komponen strategis yang perlu dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel guna memastikan ketepatan waktu dan kualitas pelaksanaan program.

Permasalahan:

- 1) Keterbatasan ketersediaan regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas dan program di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Sebagai organisasi yang baru terbentuk, diperlukan penyesuaian regulasi lama yang telah ada pada organisasi sebelumnya dan pengembangan regulasi baru agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat optimal. Ketersediaan regulasi relevan yang masih terbatas berpotensi menghambat pelaksanaan program dan pencapaian target yang telah ditetapkan.
- 2) Keterbatasan anggaran yang dialokasikan menjadi kendala signifikan dalam mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan organisasi. Kondisi ini berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja bagi

pegawai yang masih terbatas, sehingga menghambat produktivitas dan kualitas kerja.



BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian PKP menggunakan visi Presiden dalam menetapkan visi Kementerian PKP 2025-2029 yaitu **Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045**. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian PKP menetapkan misi sesuai dengan misi Presiden atau Asta Cita ke-6 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Selanjutnya, untuk mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian PKP merumuskan

tujuan-tujuan yang meliputi:

1. Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif.
2. Peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian PKP.

Sebagai langkah nyata dalam mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, Kementerian PKP menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, layak, terjangkau, dan berkelanjutan.
2. Meningkatnya kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian PK.



II.1 Tujuan Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan rumusan tujuan Sekretariat Jenderal berkontribusi dalam tujuan Kementerian PKP untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian PKP. Tujuan Sekretariat Jenderal merupakan bagian dari tujuan ke-2 Kementerian PKP 2025-2029 yaitu Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian PKP.

Dalam upaya mendukung pencapaian tujuan tersebut, Sekretariat Jenderal berkontribusi

melalui peningkatan kualitas Tata Kelola Kementerian PKP untuk meningkatkan kinerja pelayanan. Tujuan Sekretariat Jenderal yaitu **penguatan dukungan manajemen penyelenggaraan pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman**, dengan indikator tujuan yaitu *persentase penguatan dukungan manajemen penyelenggaraan pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman*.

II.2 Sasaran Program Sekretariat Jenderal

Dalam rangka pelaksanaan Dukungan Manajemen untuk mewujudkan Tata Kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang baik, dilaksanakan 1 (satu) Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian PKP, dengan salah satu Indikator Kinerja Sasaran Strategis: Tingkat kualitas Tata Kelola Kementerian PKP. Selanjutnya, sebagai turunan Sasaran Strategis tersebut, Sekretariat Jenderal memiliki **Sasaran Program: Meningkatnya**

Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PKP, dengan **Indikator Kinerja Program: Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PKP**.

Berikut tingkatan Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan beserta indikatornya untuk Program Dukungan Manajemen di lingkungan Sekretariat Jenderal.

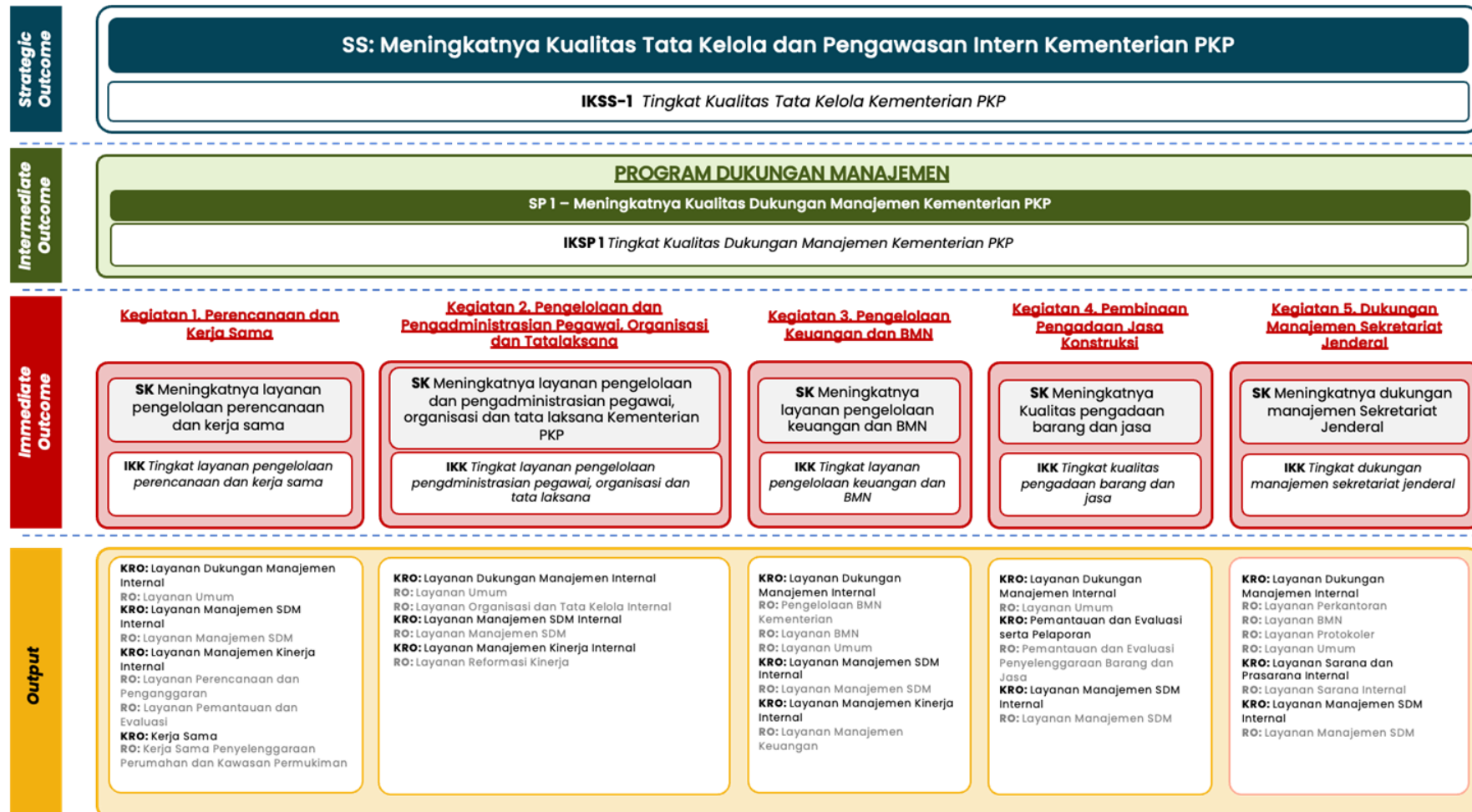


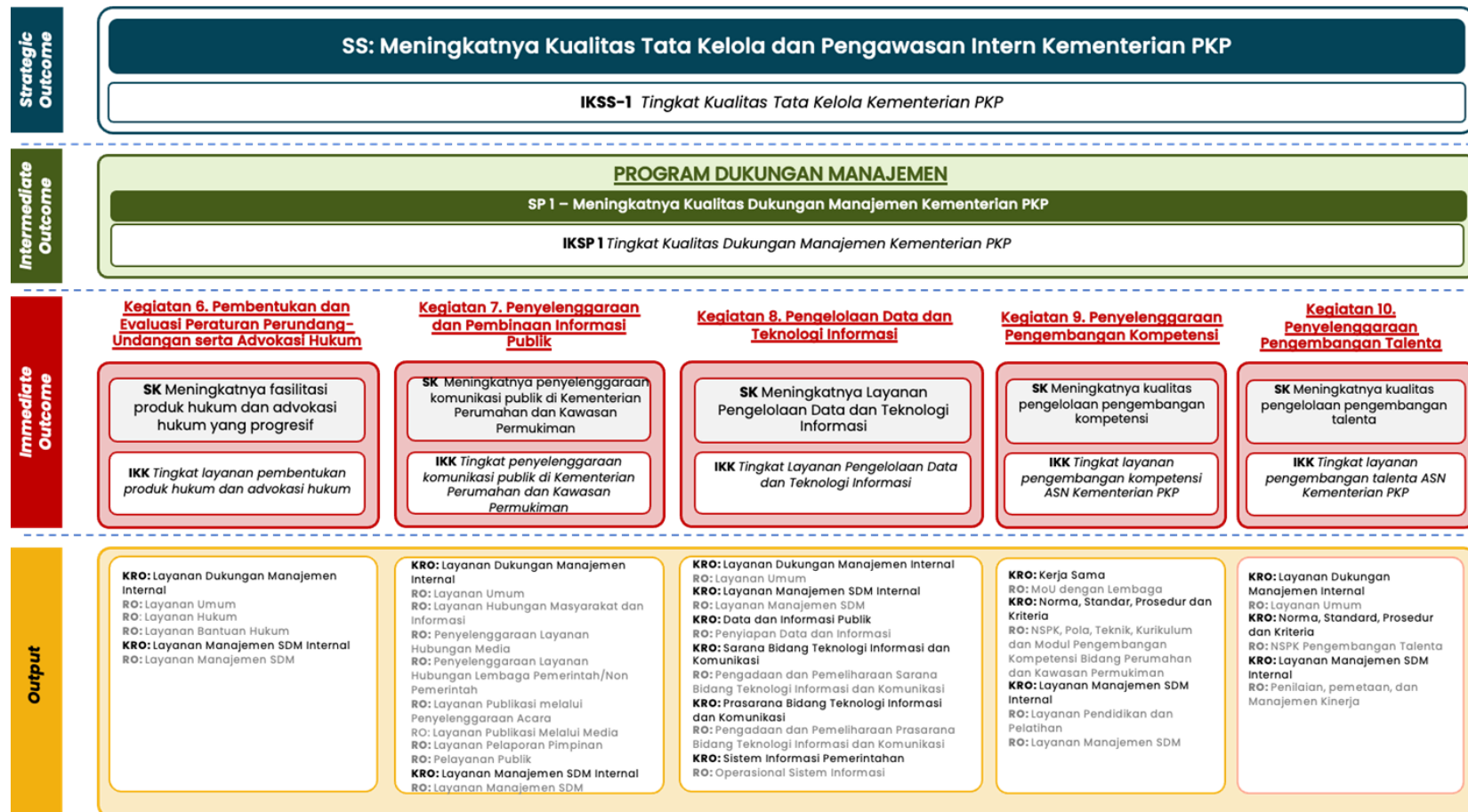
Tabel II. 1 Tingkatan Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Program Dukungan Manajemen Kementerian PKP

LEVEL KEMENTERIAN	LEVEL SEKRETARIAT JENDERAL	LEVEL BIRO/PUSAT
Sasaran Strategis (SS): Meningkatnya kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian PKP	Sasaran Program (SP): Meningkatnya kualitas dukungan manajemen Kementerian PKP	Sasaran Kegiatan 1 (SK-1): Meningkatnya layanan pengelolaan perencanaan dan kerja sama
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS-1): Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PKP	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP): Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PKP	Sasaran Kegiatan 2 (SK-2): Meningkatnya layanan pengelolaan dan pengadministrasian pegawai, organisasi, dan tata laksana Kementerian PKP
		Sasaran Kegiatan 3 (SK-3): Meningkatnya layanan pengelolaan keuangan dan BMN
		Sasaran Kegiatan 4 (SK-4): Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa
		Sasaran Kegiatan 5 (SK-5): Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal
		Sasaran Kegiatan 6 (SK-6): Meningkatnya fasilitasi produk hukum dan advokasi hukum yang progresif
		Sasaran Kegiatan 7 (SK-7): Meningkatnya penyelenggaraan komunikasi publik di Kementerian PKP
		Sasaran Kegiatan 8 (SK-8): Meningkatnya layanan pengelolaan data dan teknologi informasi
		Sasaran Kegiatan 9 (SK-9): Meningkatnya kualitas pengelolaan pengembangan kompetensi
		Sasaran Kegiatan 10 (SK-10): Meningkatnya kualitas pengelolaan pengembangan talenta

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Matriks Kinerja dan Metode Perhitungan Renstra Setjen Tahun 2025-2029

Selanjutnya, peta strategi Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.





Sumber: Berita Acara Kesepakatan Matriks Kinerja dan Metode Perhitungan Renstra Setjen Tahun 2025-2029

Gambar II. 1 Peta Strategi Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029



BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

Visi Presiden-Wakil Presiden Tahun 2025-2029 yaitu **Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**, yang mengandung makna bahwa pembangunan nasional memerlukan kolaborasi seluruh putra-putri terbaik bangsa. Visi ini dilandaskan pada fondasi yang telah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara dengan negara-negara maju pada tahun 2045. Untuk mencapai visi tersebut, salah satu Program Nasional (PN) yang menjadi prioritas adalah PN 6: membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memiliki kontribusi penting dalam mendukung program ini melalui penyediaan infrastruktur dasar pemukiman yang berkualitas dan berkeadilan.

Dalam mendukung Program Nasional tersebut, terdapat program prioritas ke-13 yang berkaitan dengan perumahan dan kawasan permukiman yaitu menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat

perdesaan/ perkotaan dan rakyat yang membutuhkan. Sebagai tindak lanjut dari program prioritas tersebut, Kementerian PKP akan melaksanakan Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins* ke-7 yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dalam lima tahun mendatang, Kementerian PKP menargetkan pembangunan 3 juta rumah sebagai bagian dari Indikasi Proyek Strategis Nasional 2025–2029 untuk mendukung pencapaian infrastruktur nasional. Secara garis besar, target ini terdiri atas pembangunan 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta rumah di perdesaan, dan 1 juta rumah di wilayah pesisir. Dengan demikian, Kementerian PKP memegang peran strategis dalam mewujudkan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan, sejalan dengan arahan Presiden dan upaya penyelesaian permasalahan di bidang perumahan.



III.1 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal

Sebagai bagian dari upaya mendukung agenda pembangunan nasional khususnya terkait target pembangunan dan renovasi 3 (tiga) juta rumah, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merumuskan arah kebijakan, yaitu **“Menjamin peningkatan akses perumahan yang layak dan terjangkau melalui pembangunan baru, peningkatan kualitas dan fasilitasi pembiayaan perumahan.”** Arah kebijakan tersebut diturunkan ke dalam 4 (empat) strategi yaitu:

1. Penguatan layanan peningkatan akses perumahan yang layak dan terjangkau;
2. Penguatan layanan penanganan permukiman kumuh yang terpadu secara kolaboratif;
3. Penguatan layanan tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel dan berintegritas; serta
4. Penguatan kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian PKP.

Berkaitan dengan tugas dan fungsi dari Sekretariat Jenderal, maka Sekretariat Jenderal berperan mendukung pada strategi Kementerian PKP yang keempat, yaitu Penguatan kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian PKP.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian PKP menjadi pedoman bagi Sekretariat Jenderal dalam menyusun arah kebijakan dan strategi dari Sekretariat Jenderal, dimana **arah kebijakan dari Sekretariat Jenderal adalah “Menjamin tata kelola yang responsif dan akuntabel guna mendukung pencapaian tujuan strategis Kementerian PKP”** yang diturunkan ke dalam 7 (tujuh) strategi, yaitu:

1. Optimalisasi peran *stakeholder* dalam mendukung pencapaian target kinerja

- a. Peningkatan kolaborasi kerjasama dalam dukungan sumber dana Non-APBN; dan
- b. Koordinasi dan tata kelola yang lebih matang dalam menyambut seluruh kemitraan dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang sangat berpotensi untuk berkontribusi lebih masif dalam menyelesaikan Program 3 Juta Rumah.



2. Penguatan pengelolaan data

- a. Penguatan tata kelola data Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan melalui penetapan kebijakan internal, penerapan prosedur kerja terstandar, dan penguatan koordinasi lintas unit. Tata kelola ini mencakup seluruh siklus hidup data, mulai dari perencanaan, pengumpulan, validasi, pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian dan pemanfaatan data secara berkelanjutan;
- b. Optimalisasi Pemanfaatan Data dalam Pengambilan Kebijakan dengan mendorong pemanfaatan data sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan publik, perencanaan pembangunan, dan pemantauan capaian program; serta
- c. Penguatan kolaborasi dan sinergi antar-instansi untuk menyelaraskan struktur data, meningkatkan keterpaduan informasi, serta mendukung integrasi sistem data sektoral dengan kebijakan pembangunan nasional. Upaya ini ditempuh melalui mekanisme koordinasi, pemanfaatan *platform* berbagi data, dan penerapan standar interoperabilitas agar pengelolaan data lebih terpadu, efisien, dan mendukung perumusan kebijakan secara lintas sektor.

3. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian

- a. Perencanaan kebutuhan anggaran dengan didasarkan pada penyusunan detail rencana program ke depan serta mempertimbangkan pelaksanaan anggaran pada tahun sebelumnya;
- b. Dukungan penguatan penerapan Sistem Pengendalian Intern bidang keuangan dan BMN melalui penyiapan dan penyusunan pedoman administrasi dan regulasi pengelolaan keuangan dan BMN di Kementerian PKP;
- c. Pembenahan tata kelola, serta peningkatan aktivitas pengawasan dan pengendalian di bidang pengelolaan keuangan dan BMN yang aktif di lingkungan Kementerian PKP; dan
- d. Memperkuat pengamanan (baik secara administrasi, hukum, dan fisik) dan melakukan penertiban BMN serta mendorong peningkatan optimalisasi dan pemanfaatan BMN Kementerian PKP.

4. Penyusunan dan harmonisasi regulasi

- a. Peningkatan fasilitasi pembentukan produk hukum yang responsif;
- b. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta peraturan lain;
- c. Peningkatan koordinasi dan manajemen pelayanan advokasi hukum yang responsif dan solutif; dan



- d. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

5. Penguatan kelembagaan dan tata kelola pengadaan barang dan jasa

- a. Pembentukan dan pengembangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sebagai pusat keunggulan pengadaan (*center of procurement excellence*);
- b. Penetapan SOP internal pengadaan barang/jasa yang terstandar;
- c. Penyusunan dan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) internal pengadaan;
- d. Penguatan fungsi pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengadaan;
- e. Pengembangan *dashboard* pengendalian PBJ yang terintegrasi dengan sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- f. Pemanfaatan sistem *e-Procurement* secara penuh (SPSE, e-Katalog, SIRUP, dll) untuk memastikan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan penyelenggaraan 3 Juta Rumah.

6. Pengelolaan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), Organisasi, dan Tata Laksana

- a. Penyusunan kebutuhan dan distribusi SDM berbasis data dan analisis beban kerja;
- b. Penguatan nilai ASN BerAKHLAK dan *employer branding* untuk menciptakan budaya kerja unggul;
- c. Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit;
- d. Pengembangan manajemen talenta ASN, termasuk pemetaan kompetensi, rencana suksesi, dan pengelolaan karier;
- e. Pembinaan dan penguatan kapasitas SDM melalui pelaksanaan pelatihan teknis dan manajerial yang bersinergi dengan berbagai pihak dan *stakeholder* terkait;
- f. Pembentukan struktur organisasi Balai Pengembangan Kompetensi guna mempercepat proses peningkatan kompetensi SDM Kementerian PKP;
- g. Pembentukan landasan formal dalam mengatur metode dan sistem peningkatan/pengembangan kompetensi bagi setiap SDM hingga unit organisasi terbawah;
- h. Penyusunan kurikulum, modul, pengembangan talenta, serta kelengkapan sarana dan prasarana pelatihan.
- i. Pengembangan organisasi dan tata laksana yang merespon kebijakan dalam mendukung Program 3 Juta Rumah;



- j. Pengembangan dan pembinaan terhadap pejabat fungsional dan pejabat pelaksana di Kementerian PKP;
- k. Pengembangan penyederhanaan struktur organisasi/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile;
- l. Penerapan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN; dan
- m. Pembinaan dan peningkatan kedisiplinan ASN dalam pelaksanaan tugas untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.

7. Transformasi digital dan penguatan komunikasi publik

- a. Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi yang sesuai dengan prinsip Satu Data, dimana memiliki standar data yang sama, metadata baku, memiliki interoperabilitas antar sistem, dan satu kode referensi data yang sama;
- b. Pembuatan aplikasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum sebagai wadah pendayagunaan atas dokumen hukum bidang perumahan dan kawasan permukiman secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian PKP;
- c. Penguatan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dan pengembangan digitalisasi layanan administrasi SDM;

- d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkungan Kementerian PKP;
- e. Peningkatan kualitas administrasi dengan fokus utama pada transformasi digital, penyederhanaan birokrasi dan regulasi;
- f. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) pelaksanaan komunikasi publik dan pelayanan publik internal Kementerian PKP;
- g. Pelaksanaan koordinasi komunikasi lintas Kementerian/Lembaga terkait komunikasi dan publikasi program dan kebijakan pada bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan kantor komunikasi Presiden, Kementerian BUMN, BP Tapera dan K/L terkait lainnya;
- h. Peningkatan kualitas SDM aparatur pelaksana pelayanan publik pada unit organisasi dan unit pelaksana teknis.
- i. Peningkatan transformasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
- j. Kerja sama advertorial untuk peningkatan keterjangkauan komunikasi publik dan publikasi Kementerian PKP.
- k. Pelaksanaan kerja sama media monitoring berbasis teknologi digital sebagai upaya sistematis dalam pemantauan opini publik dan mitigasi penyebaran disinformasi, khususnya terhadap program dan



kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

- I. Pemanfaatan berbagai kanal komunikasi, baik website, aplikasi, maupun media

sosial, sebagai sarana utama penyebaran informasi dan edukasi program Kementerian PKP.

III.2 Kerangka Regulasi

Penyusunan kerangka regulasi dilakukan untuk menjadi fondasi legal dan arah kebijakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mewujudkan pencapaian sasaran strategis selama periode Rencana Strategis Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menjamin bahwa setiap rencana yang disusun dan dilakukan berada dalam koridor hukum dan tepat arah.

Dalam konteks Rencana Strategis Sekretariat Jenderal, kerangka regulasi disiapkan untuk mendukung Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam bidang perencanaan, pengelolaan SDM, keuangan dan BMN, pengadaan barang dan jasa, umum/kesekretariatan, hukum, komunikasi publik, pengelolaan data dan informasi, serta pengembangan sumber daya manusia, sebagai berikut:

1. Regulasi fungsi perencanaan dan kerja sama, terdiri dari:
 - a. Rapermen PKP tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PKP;

- b. Rapermen PKP tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian PKP;

- c. Rapermen PKP tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat.

2. Regulasi fungsi pengelolaan dan pengadministrasian pegawai, dengan Rapermen PKP tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PKP.

3. Regulasi fungsi dukungan manajemen Sekretariat Jenderal, dengan Rapermen PKP tentang Pedoman Tata Naskah Dinas.

4. Regulasi fungsi penyelenggaraan komunikasi publik, dengan Rapermen PKP tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik.

5. Regulasi fungsi pengelolaan data dan teknologi informasi, dengan Rapermen PKP



tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Rincian regulasi tercantum pada Lampiran Matriks Kerangka Regulasi.

6. Regulasi fungsi pengelolaan pengembangan kompetensi dan talenta, dengan Rapermen PKP tentang Pengembangan Kompetensi.

III.3 Kerangka Kelembagaan

III.3.1 Tugas, Kedudukan, dan Fungsi

Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memiliki peran strategis sebagai pilar utama dalam mendukung tata kelola internal kementerian. Meski tidak langsung terlibat dalam teknis pembangunan perumahan maupun penataan kawasan permukiman, Sekretariat Jenderal bertanggung jawab dalam proses manajemen, koordinasi, serta dukungan administratif serta kelembagaan sehingga berjalan dengan terarah dan efisien.

Sekretariat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, memiliki tugas *menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian*. Sesuai dengan Peraturan Menteri PKP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PKP, dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Jenderal memiliki fungsi:

1. Koordinasi kegiatan Kementerian;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. Koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Kompleksitas fungsi yang dimiliki oleh Sekretariat Jenderal tersebut menuntut Sekretariat Jenderal sebagai organisasi harus memiliki kapasitas kelembagaan yang adaptif,



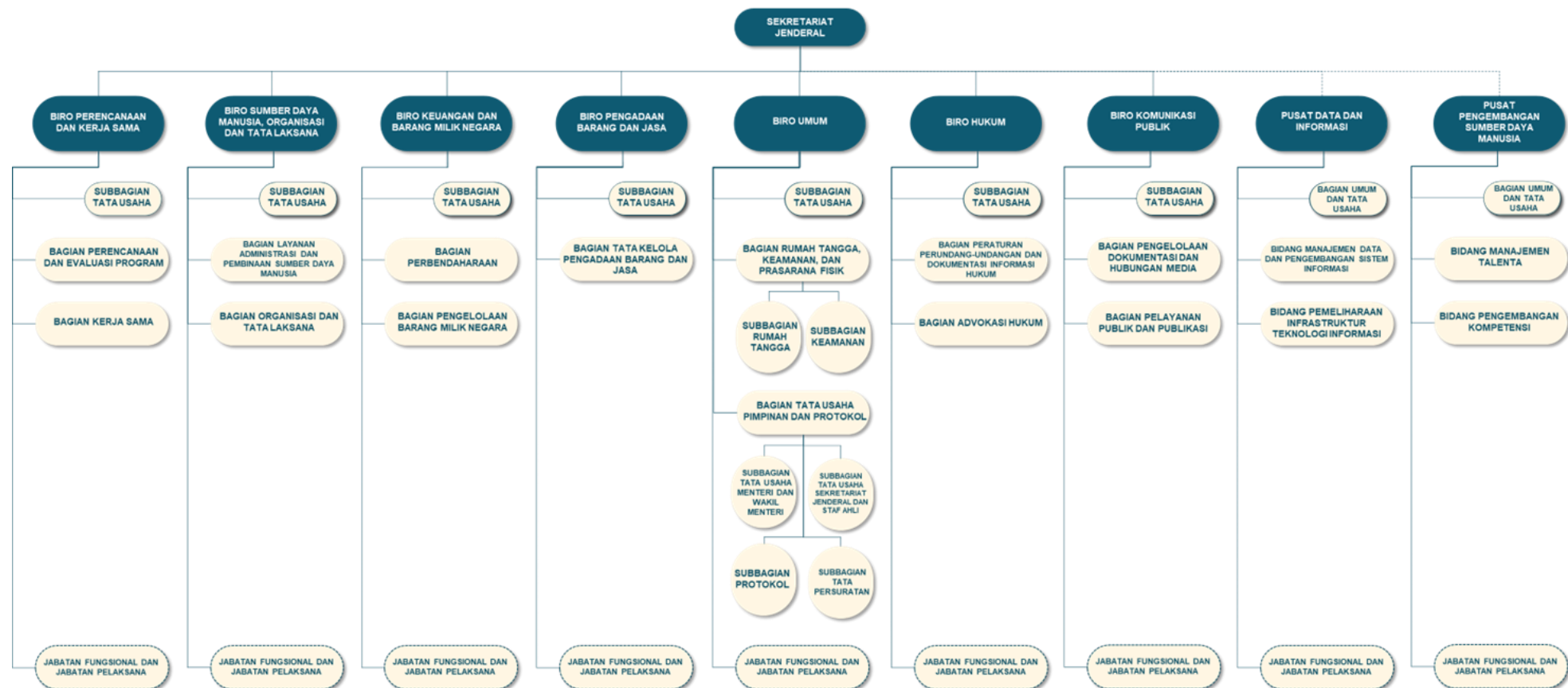
sistem kerja yang saling terintegrasi, serta sumber daya pendukung yang profesional dan responsif terhadap dinamika organisasi dan kebutuhan pelayanan publik. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal dibantu oleh biro-biro di bawahnya yang terdiri atas:

1. Biro Perencanaan dan Kerja Sama
2. Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana;
3. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
4. Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
5. Biro Umum;
6. Biro Hukum; dan
7. Biro Komunikasi Publik.

Selain itu, Menteri dibantu oleh Pusat sebagai unsur pendukung yang dikoordinasi oleh Sekretaris Jenderal, yang terdiri atas:

1. Pusat Data dan Informasi; dan
2. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia.





Sumber: Peraturan Menteri PKP Nomor 1 Tahun 2024

Gambar III.1 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian PKP



Secara rinci, tugas Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut:

Tabel III.1 Tugas dan Fungsi Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian PKP

Biro/Pusat	Tugas	Fungsi
Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana program, koordinasi administrasi penganggaran Kementerian, dan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan, serta kerja sama bidang perumahan dan kawasan permukiman.	1. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana program dan kegiatan Kementerian serta Sekretariat Jenderal; 2. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan administrasi penganggaran Kementerian; 3. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja serta laporan pelaksanaan anggaran Kementerian serta Sekretariat Jenderal; 4. Pelaksanaan koordinasi rencana program dan kegiatan serta administrasi kerja sama; 5. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kegiatan strategis Kementerian; dan 6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana Kementerian.	1. Penyusunan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan perencanaan sumber daya manusia; 2. Pelaksanaan, rekrutmen, dan seleksi sumber daya manusia; 3. Pembinaan dan pelaksanaan penempatan, mutasi, rotasi, dan promosi sumber daya manusia; 4. Penyusunan kebijakan pengembangan dan pembinaan karier dan kompetensi sumber daya manusia; 5. Pengelolaan dan pembinaan kinerja sumber daya manusia; 6. Pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; 7. Fasilitasi dan koordinasi pemberian penghargaan dan pengelolaan disiplin sumber daya manusia; 8. Pengelolaan data, informasi, dan arsip sumber daya manusia; 9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan administrasi sumber daya manusia; 10. Penyusunan, pembinaan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta fasilitasi reformasi birokrasi Kementerian; dan 11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Melaksanakan pembinaan dan penyusunan tata laksana keuangan, perbendaharaan, pelaporan keuangan, penatausahaan pendapatan negara bukan pajak dan badan layanan umum, perhitungan pertanggungjawaban keuangan negara, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja, serta pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan koordinasi pengelolaan barang milik negara dan/atau kekayaan negara, serta aset khusus pada tingkat Kementerian	1. Pembinaan dan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan; 2. Pembinaan dan pelaksanaan anggaran dan sistem pelaporan keuangan; 3. Pembinaan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak dan badan layanan umum; 4. Penyusunan tata laksana keuangan dan sistem akuntansi; 5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan; 6. Pembinaan dan penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja; 7. Penatausahaan hasil pemeriksaan; 8. Penyusunan perhitungan pertanggungjawaban keuangan negara; 9. Penyusunan laporan keuangan Kementerian dan Sekretariat Jenderal; 10. Pelaksanaan pengendalian intern keuangan dan fasilitasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; 11. Penyusunan rencana dan program pengelolaan barang milik negara; 12. Pengaturan dan pembinaan pengelolaan barang milik negara dan/atau kekayaan negara tingkat Kementerian;



Biro/Pusat	Tugas	Fungsi
		13. Pembinaan informasi dan dokumentasi serta kebijakan pengelolaan barang milik negara dan/atau kekayaan negara tingkat Kementerian; 14. Koordinasi pelaksanaan penatausahaan dan rencana kebutuhan barang milik negara tingkat Kementerian; 15. Pelaksanaan pemanfaatan, pengamanan, dan penertiban kekayaan negara dan aset khusus tingkat Kementerian; 16. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi dan perkuatan hak barang milik negara; 17. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik negara; dan 18. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan, pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi pengadaan barang dan jasa di Kementerian.	1. Pelaksanaan pembinaan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; 2. Pengembangan sistem dan pengolahan data pengadaan barang/jasa; 3. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Kementerian bidang perumahan dan kawasan permukiman; 4. Pengembangan dan pengelolaan katalog elektronik sektoral; 5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; 6. Pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; dan 7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
Biro Umum	Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, prasarana fisik, dan pelaksanaan urusan ketertiban dan keamanan serta urusan protokoler Kementerian.	1. Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan Kementerian; 2. Pelaksanaan urusan kesehatan, fasilitasi penyelenggaraan urusan perkantoran, dan angkutan sumber daya manusia; 3. Pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, rumah jabatan, serta sarana dan prasarana lingkungan; 4. Pelaksanaan pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan serta protokoler pimpinan Kementerian; 5. Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Umum, tata usaha Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, dan Staf Khusus; 6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rumah tangga, keamanan, prasarana fisik, tata usaha, dan protokol; dan 7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
Biro Hukum	Melaksanakan koordinasi dan pembinaan pembentukan peraturan perundang-undangan, pemberian advokasi hukum, pertimbangan hukum, penyusunan perjanjian, dan pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, serta penyebarluasan peraturan perundang-undangan bidang	1. Koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman; 2. Pembinaan pembentukan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman; 3. Koordinasi pemberian advokasi hukum dan pertimbangan hukum terkait tugas dan fungsi Kementerian; 4. Pembinaan pemberian advokasi hukum dan pertimbangan hukum terkait tugas dan fungsi Kementerian; 5. Koordinasi penyusunan perjanjian bidang perumahan dan kawasan permukiman; 6. Pembinaan penyusunan perjanjian bidang perumahan dan kawasan permukiman;



Biro/Pusat	Tugas	Fungsi
	perumahan dan kawasan permukiman.	7. Pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum; 8. Pembinaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum; 9. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan 10. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
Biro Komunikasi Publik	Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan komunikasi publik di Kementerian.	1. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan kehumasan Kementerian; 2. Pelaksanaan publikasi dan dokumentasi bidang perumahan dan kawasan permukiman; 3. Koordinasi pelaksanaan dan pembinaan penyelenggaraan hubungan antar lembaga; 4. Koordinasi dan penyiapan bahan laporan pimpinan; 5. Pembinaan, pengelolaan, dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Kementerian; dan 6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
Pusat Data dan Informasi	Melaksanakan pengelolaan data, informasi, dan teknologi informasi dalam rangka pelaksanaan transformasi digital di lingkungan Kementerian.	1. Penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pengelolaan data dan teknologi informasi Kementerian; 2. Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi statistik, geospasial tematik, serta audio visual di bidang perumahan dan kawasan permukiman; 3. Pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan sistem teknologi informasi, infrastruktur dan keamanan teknologi informasi; 4. Pengelolaan digitalisasi data dan produksi dokumentasi bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan 5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia bidang perumahan dan kawasan permukiman.	1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, serta program pengembangan sumber daya manusia bidang perumahan dan kawasan permukiman; 2. Pelaksanaan penilaian dan rekomendasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang perumahan dan kawasan permukiman; 3. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bidang perumahan dan kawasan permukiman; 4. Pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan 5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

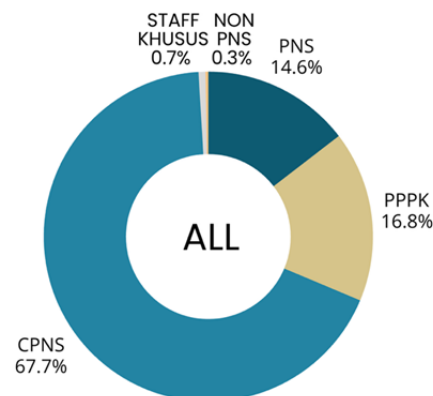
Sumber: Peraturan Menteri PKP Nomor 1 Tahun 2024



III.3.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

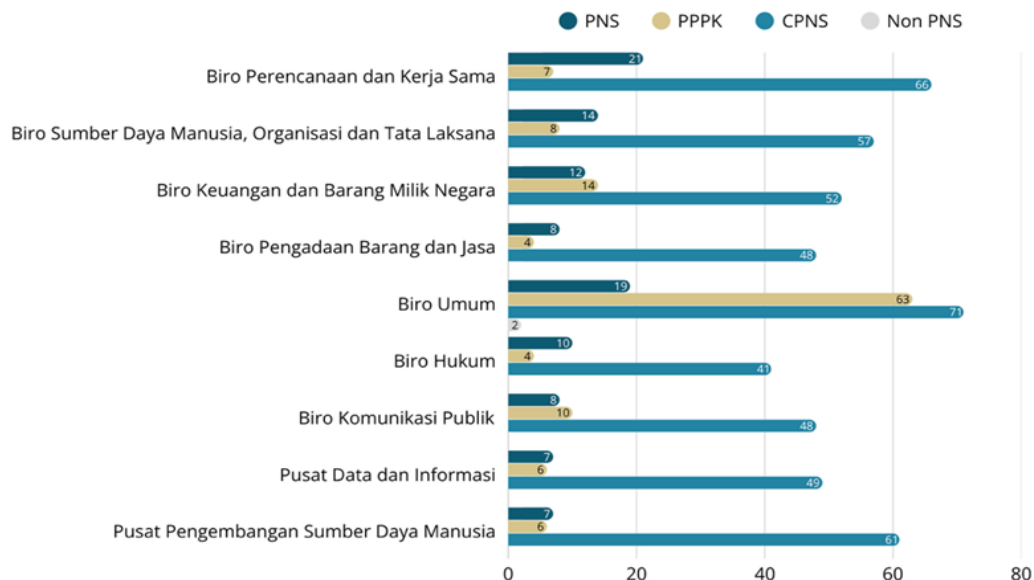
Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) per 1 Desember 2025, mengelola Sumber Daya Manusia sebanyak 748 orang pegawai atau 19,98% dari

keseluruhan pegawai Kementerian PKP yaitu sebanyak 3.742 pegawai. Adapun 748 pegawai ini terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Non-PNS yang tersebar di 9 (sembilan) Unit Kerja seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Rekapitulasi Pegawai Kementerian PKP, 1 Desember 2025

Gambar III.2 Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian PKP



Sumber: Rekapitulasi Pegawai Kementerian PKP, 1 Desember 2025

Gambar III.3 Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian PKP berdasarkan Unit Kerja

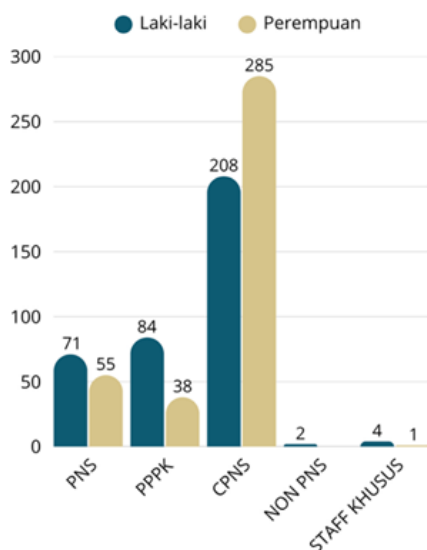


Dari total 748 pegawai Sekretariat Jenderal di Kementerian PKP, terdapat 14,6% dari keseluruhan pegawai yang merupakan PNS, 16,8% yang merupakan PPPK, 67,7% yang merupakan CPNS, 0,7% yang merupakan Staff Khusus, dan 0,3% yang merupakan Non-PNS. Jumlah pegawai terbanyak terdapat di Biro Umum dengan rincian 19 orang PNS, 63 orang PPPK, 71 orang CPNS, dan 2 orang

Non PNS.

1) Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin

Sekretariat Jenderal Kementerian PKP memiliki total 369 orang pegawai pria dan 379 orang pegawai wanita. Persebaran sumber daya manusia berdasarkan jenis kelamin pada setiap status kepegawaian dapat dilihat pada gambar berikut.

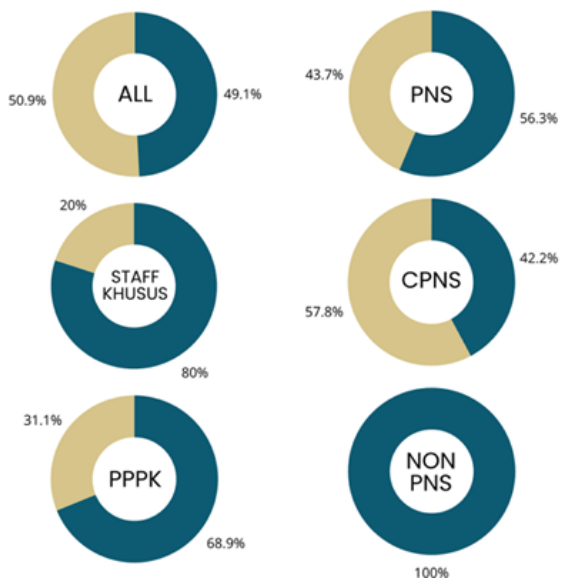


Sumber: Rekapitulasi Pegawai Kementerian PKP, 1 Desember 2025

Gambar III.4 Komposisi Pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian PKP Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari total 369 orang pegawai pria, 71 orang diantaranya merupakan PNS, 4 orang diantaranya merupakan Staff Khusus, 208 orang diantaranya merupakan CPNS, 84 orang diantaranya merupakan PPPK, dan sisanya sebanyak 2 orang merupakan Non PNS. Sedangkan dari total 378 orang pegawai wanita, 55 orang diantaranya merupakan PNS, 1 orang diantaranya

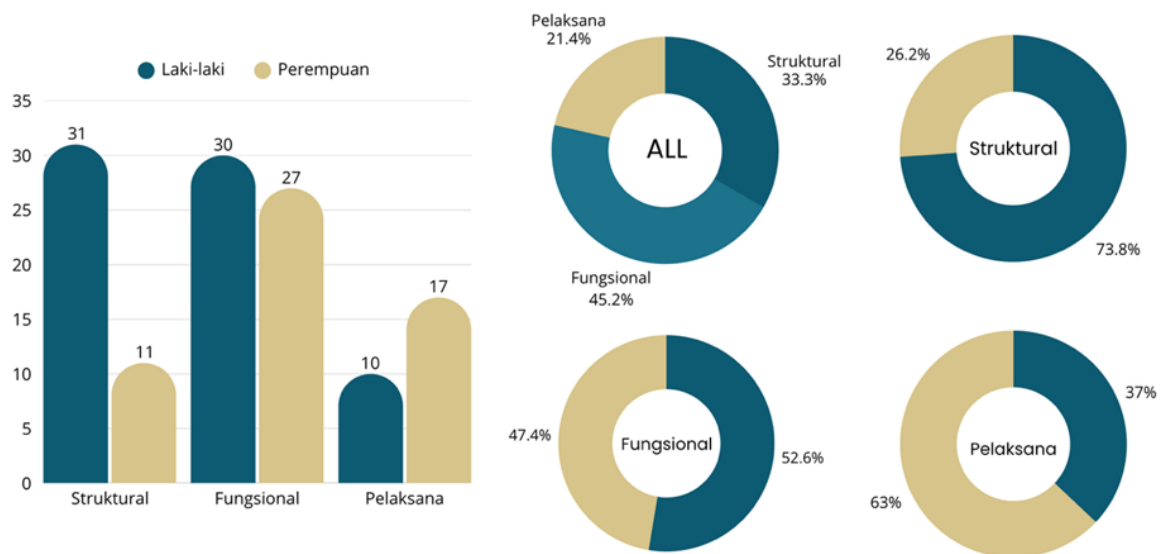
merupakan Staff Khusus, 285 orang diantaranya merupakan CPNS, dan sisanya 38 orang merupakan PPPK.



2) Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan, Eselonisasi, dan Golongan

Berdasarkan jabatan, komposisi PNS Sekretariat Jenderal Kementerian PKP terbagi menjadi 3

(tiga) kelompok, yaitu struktural, fungsional, dan pelaksana, dengan persebaran seperti yang disajikan pada gambar berikut.



Sumber: Rekapitulasi Pegawai Kementerian PKP, 1 Desember 2025

Gambar III.5 Komposisi PNS Sekretariat Jenderal Berdasarkan Jabatan

Dari total 126 orang PNS, terdapat 42 orang PNS dengan jabatan Struktural, 57 orang PNS dengan jabatan Fungsional, dan 27 orang PNS dengan jabatan Pelaksana. Selanjutnya, berdasarkan

tingkat eselon, komposisi PNS Sekretariat Jenderal Kementerian PKP terbagi dalam 5 (lima) kelompok eselon seperti yang disajikan pada gambar berikut.

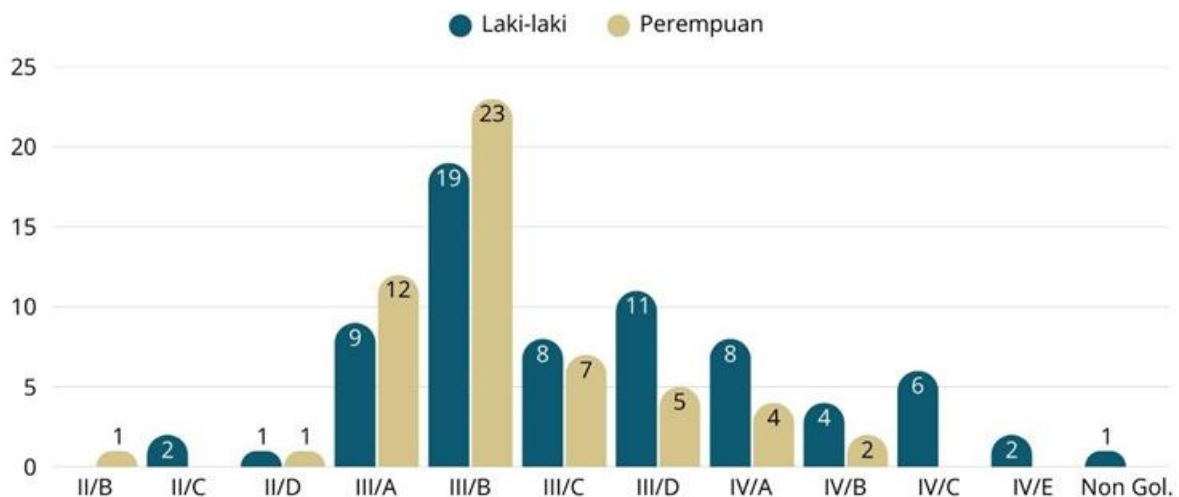


Sumber: Rekapitulasi Pegawai Kementerian PKP, 1 Desember 2025

Gambar III.6 Komposisi PNS Sekretariat Jenderal Berdasarkan Eselonisasi

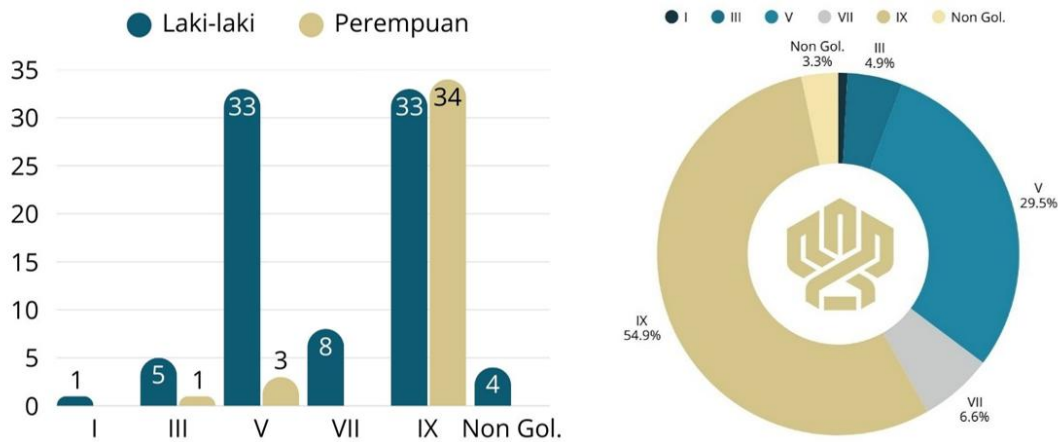
Dari total 126 orang PNS, terdapat 5 (lima) orang PNS Eselon I, 8 (delapan) orang PNS Eselon II, 19 orang PNS Eselon III, 10 orang PNS Eselon IV, dan 84 orang PNS Non-Eselon. Selanjutnya, berdasarkan golongan, komposisi PNS

Sekretariat Jenderal Kementerian PKP terbagi dalam 12 kelompok, sedangkan PPPK Sekretariat Jenderal terbagi menjadi 2 (dua) seperti yang disajikan pada gambar berikut.



Sumber: Rekapitulasi Pegawai Kementerian PKP, 1 Desember 2025

Gambar III.7 Komposisi PNS Sekretariat Jenderal Berdasarkan Golongan

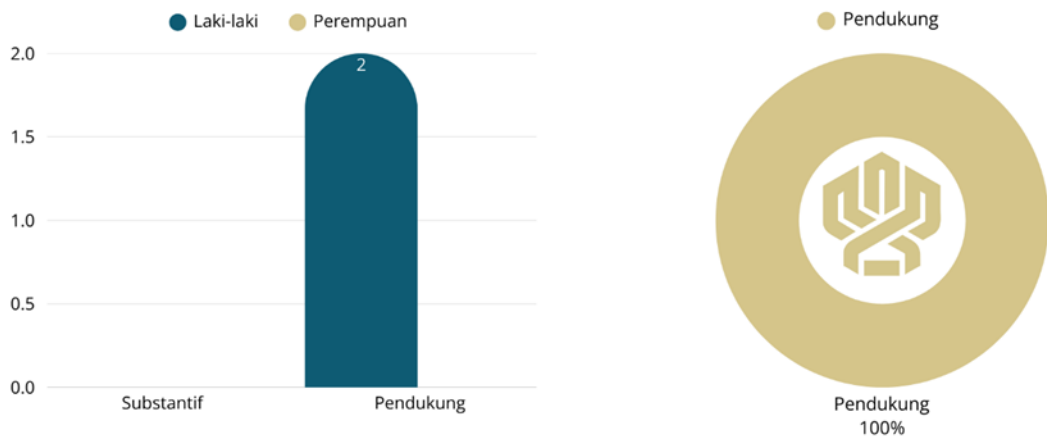


Sumber: Rekapitulasi Pegawai Kementerian PKP, 1 Desember 2025

Gambar III.8 Komposisi PPPK Sekretariat Jenderal Kementerian PKP Berdasarkan Golongan

Dari total 126 PNS, terdapat 6 (enam) orang PNS Golongan II, 94 orang PNS Golongan III, dan 26 orang PNS Golongan IV. Sedangkan dari total 122 orang PPPK, terdapat 1 (satu) orang PPPK

Golongan I, 6 (enam) orang PPPK Golongan III, 36 orang PPPK Golongan V, 8 orang PPPK Golongan VII, 67 orang PPPK Golongan IX, dan 4 orang non golongan.



Sumber: Rekapitulasi Pegawai Kementerian PKP, 1 Desember 2025

Gambar III.9 Komposisi Non PNS Sekretariat Jenderal Kementerian PKP Berdasarkan Golongan

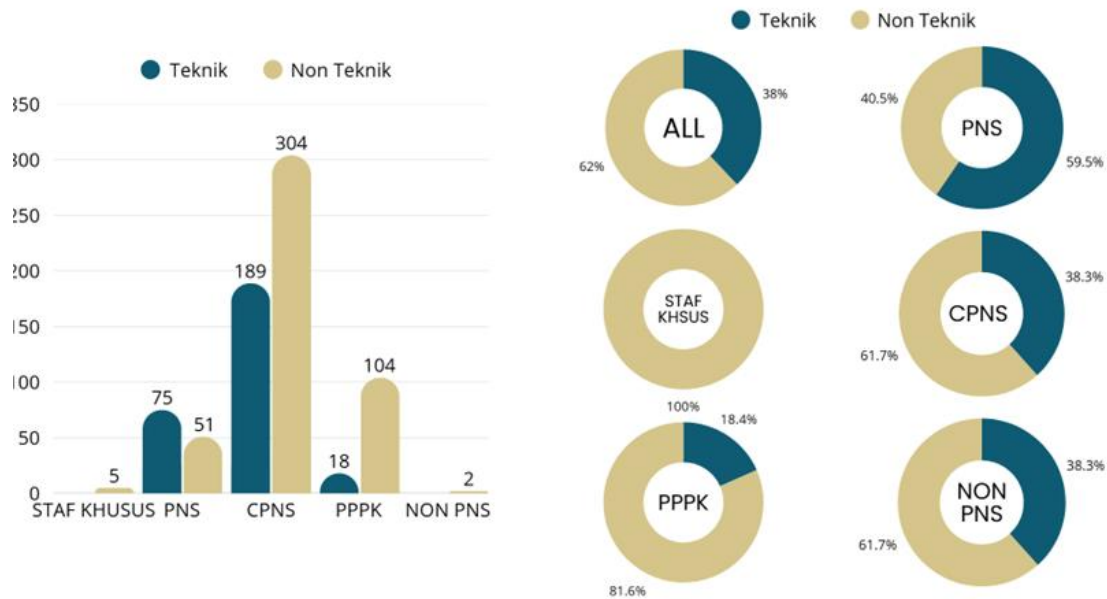
Selanjutnya, berdasarkan golongan, komposisi Non-PNS Sekretariat Jenderal PKP terdiri dari 2

(dua) orang yang seluruhnya merupakan tenaga pendukung.

3) Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan dan Usia

Sekretariat Jenderal Kementerian PKP memiliki total 282 orang pegawai dengan latar belakang pendidikan teknik dan 466 orang pegawai

dengan latar belakang pendidikan non teknik. Berikut adalah persebaran sumber daya manusia berdasarkan bidang pendidikan dan tingkat pendidikan pada setiap status kepegawaian.

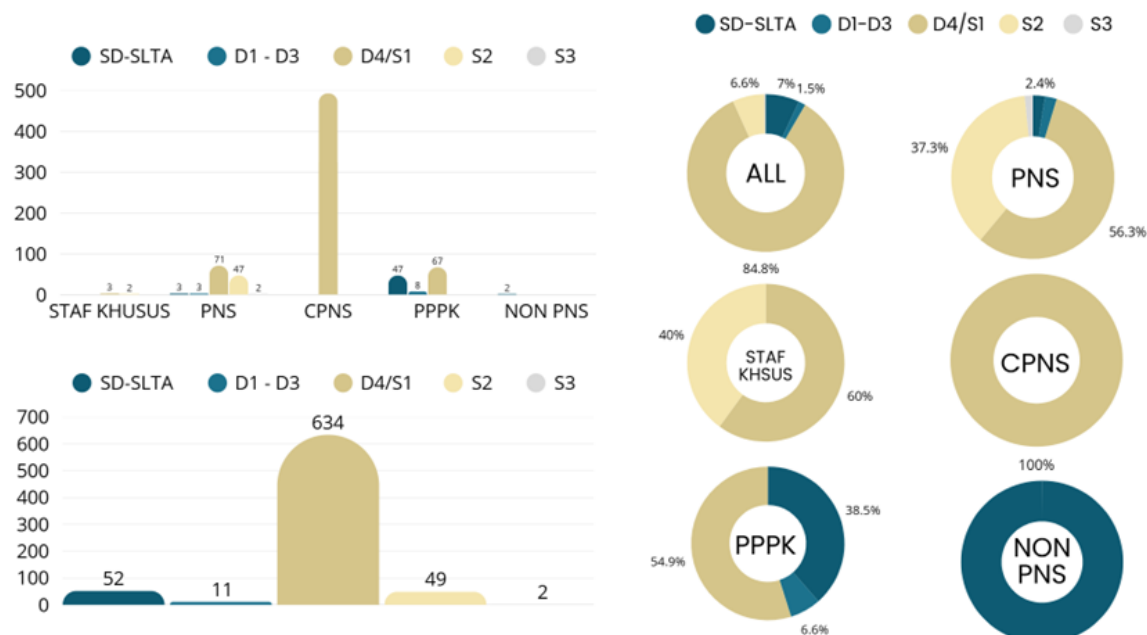


Sumber: Rekapitulasi Pegawai Kementerian PKP, 1 Desember 2025

Gambar III.10 Komposisi Pegawai Sekretariat Jenderal PKP Berdasarkan Bidang Pendidikan

Dari total 558 Pegawai Sekretariat Jenderal, 282 orang Pegawai memiliki latar belakang pendidikan teknik, dengan rincian 75 orang PNS, 189 orang CPNS, dan 18 orang PPPK.

Sedangkan 466 orang Pegawai memiliki latar belakang pendidikan non teknik, dengan rincian 5 orang Staf Khusus 51 orang PNS, 304 orang CPNS, 104 orang PPPK dan 2 orang Non PNS.

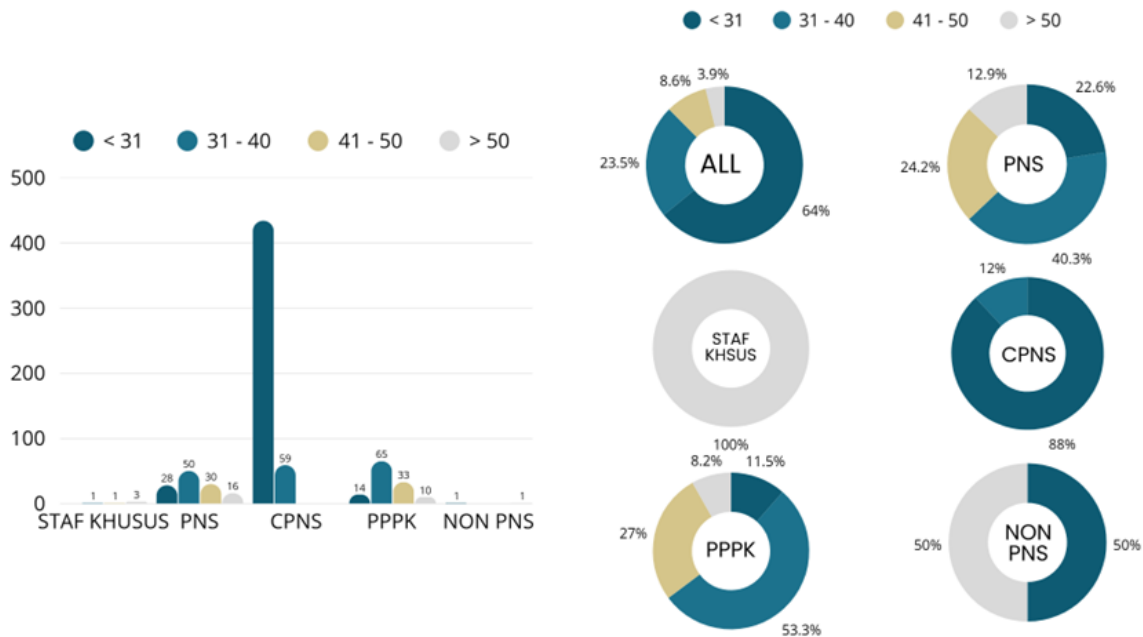


Sumber: Rekapitulasi Pegawai Kementerian PKP, 1 Desember 2025

Gambar III.11 Komposisi Pegawai Sekretariat Jenderal Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari total 743 pegawai di Sekretariat Jenderal, terdapat 52 orang (7%) dengan pendidikan tamatan SLTA ke bawah, 11 orang (1,5%) tamatan D1 hingga D3, 631 orang (84,8%) tamatan D4/S1, 47 orang (6,6%) tamatan S2, dan 2 orang (0,3%) tamatan S3.

Berdasarkan usia, komposisi pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian PKP dibagi ke dalam 4 kelompok usia yaitu: kelompok di bawah 31 tahun, kelompok 31-40 tahun, kelompok 41-50 tahun, dan kelompok usia lebih dari 50 tahun yang disajikan pada gambar berikut.



Sumber: Rekapitulasi Pegawai Kementerian PKP, 1 Desember 2025

Gambar III.12 Komposisi Pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian PKP Berdasarkan Usia

Dari total 743 pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian PKP, 477 diantaranya (63,9%) berusia di bawah 31 tahun, 175 diantaranya (23,5%) berusia 31-40 tahun, 64 diantaranya

(8,6%) berusia 41-50 tahun, dan 30 diantaranya (4%) berusia lebih dari 50 tahun.

III.4 Pengarusutamaan Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025-2029 menggunakan 5 (lima) pengarusutamaan pembangunan. Esensi dari pengarusutamaan ini adalah untuk memperluas manfaat hasil pembangunan sekaligus mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul, guna menciptakan pemerataan dan keadilan bagi seluruh masyarakat, dengan tetap menjaga kualitas lingkungan. Pengarusutamaan dilaksanakan melalui pengintegrasian secara konsisten pendekatan (1) Gender dan Inklusi Sosial, (2) Pembangunan Berkelanjutan, (3) Transformasi Digital, (4) Pembangunan Rendah Karbon, serta (5) Pembangunan Berketahanan Iklim, ke dalam seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

III.4.1 Gender dan Inklusi Sosial

1) Sasaran

Sasaran dari Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial adalah terwujudnya pembangunan yang adil, setara, dan inklusif bagi semua kelompok masyarakat dengan mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan dan program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

2) Upaya

- a. Meningkatkan penggunaan data terpilah dan analisis gender dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan di lingkungan Kementerian PKP.
- b. Mengembangkan pola karier ASN Kementerian PKP yang responsif gender.
- c. Menyusun kebijakan internal yang mendorong partisipasi inklusif untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas diskriminasi di Kawasan Kementerian PKP.
 - (i) Penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas.
 - (ii) Penyediaan ruang laktasi untuk mendukung lingkungan kerja yang ramah bagi perempuan.
 - (iii) Penyusunan mekanisme pengaduan yang aman dan responsif terhadap isu diskriminasi atau kekerasan.



III.4.2 Pembangunan Berkelanjutan

1) Sasaran

Sasaran dari Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan adalah terwujudnya harmonisasi antara agenda pembangunan nasional dan 17 *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau biasa disebut dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan guna menjamin keberlanjutan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan.

2) Upaya

- a. Mendorong prinsip ramah lingkungan dalam seluruh kegiatan operasional dan dukungan manajemen di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian PKP.
- b. Menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan yang menguraikan kontribusi terhadap SDGs.
- c. Meningkatkan kompetensi ASN Kementerian PKP melalui pelatihan internal pengarusutamaan SDGs bagi para perencana dan penyusun program dukungan manajemen.

III.4.3 Transformasi Digital

1) Sasaran

Sasaran dari Pengarusutamaan Transformasi Digital adalah terwujudnya tata kelola Kementerian PKP yang adaptif, efisien, transparan, dan responsif melalui percepatan

transformasi digital di bidang layanan publik, manajemen birokrasi, serta data dan informasi kementerian.

2) Upaya

- a. Meningkatkan penggunaan sistem *e-office* secara komprehensif dan terintegrasi untuk mendukung percepatan dan efisiensi tata kelola administrasi dan birokrasi kementerian.
- b. Meningkatkan penggunaan data terintegrasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan program dan kebijakan.
- c. Meningkatkan kapasitas ASN Kementerian PKP dalam literasi digital dan manajemen data, termasuk pelatihan penggunaan aplikasi sistem informasi.

III.4.4 Pembangunan Rendah Karbon

1) Sasaran

Sasaran dari Pengarusutamaan Rendah Karbon adalah terwujudnya pembangunan yang ramah lingkungan melalui transisi menuju energi hijau, efisiensi penggunaan sumber daya, dan penerapan prinsip ekonomi sirkular guna menurunkan emisi dan menjaga daya dukung lingkungan bagi generasi mendatang.



2) Upaya

- a. Mendorong perilaku hemat energi di lingkungan kerja ASN Sekretariat Jenderal Kementerian PKP, seperti:
 - (i) Mendorong ASN Kementerian PKP untuk menggunakan transportasi umum dalam melakukan mobilisasi.
 - (ii) Mendorong ASN Kementerian PKP untuk menggunakan kendaraan listrik atau *electric vehicle* (EV) dalam melakukan mobilisasi.
 - (iii) Efisiensi penggunaan listrik dan air pada kantor-kantor di lingkungan Kementerian PKP.
- b. Mendorong penerapan perilaku *zero-waste* dalam penggunaan fasilitas di lingkungan kerja ASN Sekretariat Jenderal Kementerian PKP.
 - (i) Mendorong ASN Kementerian PKP untuk mengurangi penggunaan plastik seperti membawa alat/tempat makan dan minum pribadi serta menggunakan *reusable shopping bag*.
 - (ii) Menerapkan kebijakan penggunaan kertas pada kedua sisi untuk menuju penerapan *paperless office* di lingkungan Kementerian PKP.
 - (iii) Mengurangi penggunaan kemasan plastik dan kardus dalam pengadaan *snack box*/makanan saji.

- c. Mendorong penerapan konsep *green building* dalam perencanaan desain dan konstruksi gedung kantor di lingkungan kerja Kementerian PKP.

III.4.5 Pembangunan Berketahanan Iklim

1) Sasaran

Sasaran dari Pengarusutamaan Berketahanan Iklim adalah terwujudnya peningkatan ketahanan masyarakat dan wilayah melalui integrasi adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana dalam kebijakan dan program, guna melindungi masyarakat serta aset pembangunan dari dampak krisis iklim.

2) Upaya

- a. Mendorong integrasi kajian dan pertimbangan iklim dan risiko bencana dalam perencanaan fasilitas dan pengelolaan aset di lingkungan Kementerian PKP.
- b. Meningkatkan kapasitas dan kesadaran ASN Kementerian PKP mengenai risiko bencana dan strategi adaptasi perubahan iklim.



BAB IV
**TARGET KINERJA DAN
KERANGKA PENDANAAN**

Sekretariat Jenderal berkontribusi dalam Sasaran Strategis (SS-2) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian PKP. Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) tersebut yaitu Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP. Sasaran Strategis tersebut dicapai melalui Program Dukungan Manajemen, dengan Sasaran Program (SP) yaitu Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PKP. Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) tersebut yaitu Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PKP. Berikut rincian kegiatan generik pada Program Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029.

1. Unit Kerja: Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Kegiatan: Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama

Sasaran Kegiatan (SK): Meningkatnya Layanan Pengelolaan Perencanaan dan Kerja Sama

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Tingkat Layanan Pengelolaan Perencanaan dan Kerja Sama

Output:

- a) EBA.962-Layanan Umum
- b) EBA.954-Layanan Manajemen SDM

c) EBD.952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran

d) EBD.953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi

e) AEC.001-Kerja Sama Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

2. Unit Kerja: Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana

Kegiatan: Pengelolaan dan Pengadministrasian Pegawai, Organisasi dan Tata Laksana

Sasaran Kegiatan (SK): Meningkatnya Layanan Pengelolaan dan Pengadministrasian Pegawai, Organisasi dan Tata Laksana Kementerian PKP

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Tingkat Layanan Pengelolaan Pengadministrasian Pegawai, Organisasi dan Tata Laksana

Output:

- a) EBA.960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
- b) EBA.962-Layanan Umum
- c) EBC.954-Layanan Manajemen SDM
- d) EBD.961-Layanan Reformasi Kinerja

3. Unit Kerja: Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Kegiatan: Pengelolaan Keuangan dan BMN

Sasaran Kegiatan (SK): Meningkatnya Layanan Pengelolaan Keuangan dan BMN



Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK):
Tingkat Layanan Pengelolaan Keuangan dan
BMN

Output:

- a) EBA.955-Pengelolaan BMN Kementerian
- b) EBA.956-Layanan BMN
- c) EBA.962-Layanan Umum
- d) EBC.954-Layanan Manajemen SDM
- e) EBD.955-Layanan Manajemen Keuangan

4. Unit Kerja: Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kegiatan: Pembinaan Pengadaan Jasa
Konstruksi

Sasaran Kegiatan (SK): Meningkatnya Kualitas
Pengadaan Barang dan Jasa

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK):
Tingkat Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa

Output:

- a) EBA.962-Layanan Umum
- b) FAE.001-Pemantauan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Barang dan Jasa
- c) EBC.954-Layanan Manajemen SDM

5. Unit Kerja: Biro Umum

Kegiatan: Dukungan Manajemen Sekretariat
Jenderal

Sasaran Kegiatan (SK): Meningkatnya
Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK):
Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat
Jenderal

Output:

- a) EBA.994-Layanan Perkantoran
- b) EBA.956-Layanan BMN

- c) EBA.959-Layanan Protokoler
- d) EBA.962-Layanan Umum
- e) EBB.951-Layanan Sarana Internal
- f) EBC.954-Layanan Manajemen SDM

6. Unit Kerja: Biro Hukum

Kegiatan: Pembentukan dan Evaluasi
Peraturan Perundang-Undangan serta
Advokasi Hukum

Sasaran Kegiatan (SK): Meningkatnya
Fasilitasi Produk Hukum dan Advokasi Hukum
yang Progresif

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK):
Tingkat Layanan Pembentukan Produk
Hukum dan Advokasi Hukum

Output:

- a) EBA.962-Layanan Umum
- b) EBA.957-Layanan Hukum
- c) EBA.969-Layanan Bantuan Hukum
- d) EBC.954-Layanan Manajemen SDM

7. Unit Kerja: Biro Komunikasi Publik

Kegiatan: Penyelenggaraan dan Pembinaan
Informasi Publik

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya
Penyelenggaraan Komunikasi Publik di
Kementerian Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK):
Tingkat Penyelenggaraan Komunikasi Publik
di Kementerian Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Output:

- a) EBA.962-Layanan Umum



- b) EBA.958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
- c) EBA.970-Penyelenggaraan Layanan Hubungan Media
- d) EBA.971-Penyelenggaraan Layanan Hubungan Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah
- e) EBA.972-Layanan Publikasi melalui Penyelenggaraan Acara
- f) EBA.973-Layanan Publikasi melalui Media
- g) EBA.974-Layanan Pelaporan Pimpinan
- h) EBA.975-Pelayanan Publik
- i) EBC.954-Layanan Manajemen SDM

8. Unit Kerja: Pusat Data dan Informasi

Kegiatan: Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Layanan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Tingkat Layanan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi

Output:

- a) EBA.962-Layanan Umum
- b) EBC.954-Layanan Manajemen SDM
- c) BMA.001-Penyiapan Data dan Informasi
- d) CAN.001-Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
- e) CBT.001-Pengadaan dan Pemeliharaan Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

- f) FAB.001-Operasional Sistem Informasi

9. Unit Kerja: Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kegiatan 1: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengembangan Kompetensi

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Tingkat Layanan Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian PKP

Output:

- a) AEC.001-MoU dengan Lembaga
- b) AFA.001-NSPK, Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Pengembangan Kompetensi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- c) EBC.996-Layanan Pendidikan dan Pelatihan
- d) EBC.954-Layanan Manajemen SDM

Kegiatan 2: Penyelenggaraan Pengembangan Talenta

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengembangan Talenta

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Tingkat Layanan Pengembangan Talenta ASN Kementerian PKP

Output:

- a) EBA.962-Layanan Umum
- b) AFA.001-NSPK Pengembangan Talenta
- c) EBC.001-Penilaian, Pemetaan, dan Manajemen Kinerja



IV.1 Target Kinerja

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, dalam rangka mendukung strategi keempat Kementerian PKP yaitu Penguatan Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sekretariat Jenderal Kementerian PKP menetapkan 1 (satu) Sasaran Program berupa Meningkatkan Kualitas Dukungan Manajemen

Kementerian PKP yang berfungsi mendukung 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Strategis dari Kementerian PKP berupa Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP. Target Kinerja untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

Tabel IV. 1 Target Kinerja untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program Tahun 2025 – 2029

PROGRAM	SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/ SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
UNIT ORGANISASI: SEKRETARIAT JENDERAL								
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN								
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian PKP								
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS: Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP		%	84,9	86,7	88,5	90,3	91,8	91,8
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PKP								
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM: Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PKP		%	80,4	84,0	87,7	91,1	94,1	94,1

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Matriks Kinerja dan Metode Perhitungan Renstra Setjen Tahun 2025-2029, diolah

1. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Pada Tahun 2025 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu sebesar 84,9% kemudian pada akhir periode Renstra Tahun 2029 ditetapkan target sebesar 91,8%. Target tersebut diperoleh dari metode perhitungan

dengan menjumlahkan 2 (dua) sub indikator sebagai berikut:

- Tingkat Kepuasan Layanan Administrasi Kementerian PKP dengan bobot sebesar 70%. Bobot perhitungan Tingkat Kepuasan Layanan Administrasi Kementerian PKP

merupakan kontribusi dari Unit Organisasi pada Kementerian PKP yaitu:

- 1) Sekretariat Jenderal dengan bobot sebesar 60%;
 - 2) Seluruh Unit Organisasi dengan bobot sebesar 30%;
 - 3) Balai dengan bobot sebesar 10%.
- b. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PKP dengan bobot sebesar 30%, merupakan penilaian eksternal dari Kementerian PAN-RB dengan indikator sebagai berikut:
- 1) Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi (Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi) dengan bobot sebesar 1%;
 - 2) Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai (Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi) dengan bobot sebesar 1%;
 - 3) Indeks SPBE dengan bobot sebesar 6%;
 - 4) Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE (Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE) dengan bobot sebesar 1%;
 - 5) Tingkat Maturitas SPIP dengan bobot sebesar 2%;
 - 6) Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) dengan bobot sebesar 1%;
 - 7) Indeks Kualitas Kebijakan dengan bobot sebesar 1%;

8) Indeks Reformasi Hukum dengan bobot sebesar 1%;

- 9) Tingkat Digitalisasi Arsip dengan bobot sebesar 1%;
- 10) Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor (Indeks Pembangunan Statistik) dengan bobot sebesar 1%;
- 11) Opini BPK dengan bobot sebesar 3%;
- 12) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dengan bobot sebesar 2%;
- 13) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan bobot sebesar 1%;
- 14) Indeks Pengelolaan Aset dengan bobot sebesar 1%;
- 15) Survei Kepuasan Masyarakat dengan bobot sebesar 5%;
- 16) Indeks Pelayanan Publik dengan bobot sebesar 1%;
- 17) Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dengan bobot sebesar 1%.

2. Target Indikator Kinerja Sasaran Program

Selanjutnya untuk target Indikator Kinerja Sasaran Program pada Tahun 2025 yaitu sebesar 80,4% kemudian pada akhir periode Renstra Tahun 2029 ditetapkan target sebesar 94,1%. Target tersebut diperoleh dari metode perhitungan penjumlahan 10 (sepuluh) indikator kontributor sebagai berikut:

- a. Tingkat Layanan Pengelolaan Perencanaan dan Kerja Sama dengan bobot sebesar 10%;



- b. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai dengan bobot sebesar 10%;
- c. Tingkat Layanan Pengelolaan Keuangan dan BMN dengan bobot sebesar 10%;
- d. Tingkat Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa dengan bobot sebesar 10%;
- e. Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal dengan bobot sebesar 10%;
- f. Tingkat layanan pembentukan produk hukum dan advokasi hukum dengan bobot sebesar 10%;
- g. Tingkat Penyelenggaraan Komunikasi Publik di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan bobot sebesar 10%;
- h. Tingkat Layanan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi dengan bobot sebesar 10%;
- i. Tingkat Layanan Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian PKP dengan bobot sebesar 10%;
- j. Tingkat Layanan Pengembangan Talenta ASN Kementerian PKP dengan bobot sebesar 10%.



Selanjutnya rincian target kinerja Indikator kontributor dari Indikator Kinerja Program yaitu Kinerja Kegiatan yang merupakan indikator sebagai berikut.

Tabel IV.2 Rincian Target Kinerja untuk Indikator Kinerja Kegiatan

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB INDIKATOR		SATUAN	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
KEGIATAN 1: Perencanaan dan Kerja Sama									
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya layanan pengelolaan perencanaan dan kerja sama									
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat layanan pengelolaan perencanaan dan kerja sama			%	92,6	93,2	93,8	94,5	95,1	95,1
SUB INDIKATOR:									
1	Tingkat layanan kepegawaian dan umum		%	91,1	91,3	91,5	91,7	91,9	91,9
2	Tingkat kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran		%	75	78	81	84	87	87
3	Tingkat Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Kementerian PKP, Sekretariat Jenderal, dan Biro Perencanaan dan Kerja Sama		%	92,2	92,3	92,4	92,5	92,6	92,6
4	Tingkat pelaporan pemantauan dan evaluasi yang lengkap dan terkini		%	100	100	100	100	100	100
5	Tingkat layanan kerja sama bidang PKP yang efektif		%	100	100	100	100	100	100
PELAKSANA: Biro Perencanaan dan Kerja Sama									
KEGIATAN 2: Pengelolaan dan Pengadministrasian Pegawai, Organisasi dan Tatalaksana									
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya layanan pengelolaan dan pengadministrasian pegawai, organisasi dan tata laksana Kementerian PKP									
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat layanan pengelolaan pengadministrasian pegawai, organisasi dan tata laksana			%	71,5	76,0	80,6	85,1	89,6	89,6
SUB INDIKATOR:									
1	Tingkat layanan kepegawaian dan umum		%	85,1	85,4	85,6	85,9	86,1	86,1
2	Tingkat kualitas layanan manajemen SDM Kementerian PKP		%	70	75	80	85	90	90
3	Tingkat kesesuaian kelembagaan		%	70	75	80	85	90	90
PELAKSANA: Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana									
KEGIATAN 3: Pengelolaan Keuangan dan BMN									
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya layanan pengelolaan Keuangan dan BMN									
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat layanan pengelolaan Keuangan dan BMN			%	83,2	84,8	86,6	88,3	90,0	90,01
SUB INDIKATOR:									
1	Tingkat layanan kepegawaian dan umum		%	85,1	85,4	85,6	85,9	86,1	86,1
2	Tingkat kualitas layanan perbendaharaan dan PNBPN		%	77,3	83,6	89	94,5	100	100
3	Tingkat kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian		%	88,2	88,5	90	91,4	92,9	92,9
4	Tingkat kualitas laporan keuangan Kementerian		%	88,9	90,2	91,5	92,8	94,2	94,2
5	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP		%	92	92	92	92	92	92
6	Persentase tindak lanjut rekomendasi atas temuan LHP BPK-RI		%	98,9	98,9	99	99,2	99,3	99,3
7	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		%	72,3	74,2	76,6	78,5	80,6	80,6
8	Tingkat efektivitas penatausahaan, pemanfaatan dan penertiban BMN		%	66,7	69,7	72,7	75,7	78,7	78,7
PELAKSANA: Biro Keuangan dan Barang Milik Negara									
KEGIATAN 4: Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi									



KEGIATAN			SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB INDIKATOR		SATUAN	TARGET					
						2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa											
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa					%	98,5	98,5	98,6	98,6	98,6	98,6
SUB INDIKATOR:											
	1	Tingkat layanan kepegawaian dan umum			%	85,1	85,4	85,6	85,9	86,1	86,1
	2	Persentase pelaksanaan layanan tender			%	100	100	100	100	100	100
	3	Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi paket pengadaan konstruksi			%	100	100	100	100	100	100
PELAKSANA: Biro Pengadaan Barang dan Jasa											
KEGIATAN 5: Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal											
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal											
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat dukungan manajemen Sekretariat Jenderal					%	76,5	80,6	87,6	90,5	93,5	93,5
SUB INDIKATOR:											
	1	Tingkat layanan kepegawaian dan umum			%	85,1	85,4	85,6	85,9	86,1	86,1
	2	Tingkat layanan kesehatan dan fasilitas penyelenggaraan urusan perkantoran, dan angkutan sumber daya manusia			%	85	90	100	100	100	100
	3	Tingkat kualitas pemeliharaan dan pengelolaan utilitas, bangunan gedung, rumah jabatan, serta sarana dan prasarana lingkungan			%	85	90	100	100	100	100
	4	Tingkat kualitas pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan			%	84,2	85,3	86,5	87,7	89,9	89,9
	5	Tingkat layanan tata usaha dan rumah tangga Menteri dan Wakil Menteri			%	85,1	85,4	85,6	85,9	86,1	86,1
	6	Tingkat layanan tata usaha dan rumah tangga Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, dan Staf Khusus			%	65,4	71,8	76,8	81,8	86,3	86,3
	7	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas, persuratan, kearsipan Kementerian, dan pengelolaan ketatausahaan BMN Biro Umum			%	33,3	46,67	73,3	86,66	100	100
	8	Tingkat layanan fasilitas pembinaan protokoler Kementerian			%	100	100	100	100	100	100
PELAKSANA: Biro Umum											
KEGIATAN 6: Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Serta Advokasi Hukum											
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya fasilitasi produk hukum dan advokasi hukum yang progresif											
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat layanan pembentukan produk hukum dan advokasi hukum					%	70,5	76,6	82,5	89,5	90,1	90,1
SUB INDIKATOR:											
	1	Tingkat layanan kepegawaian dan umum			%	85,1	85,4	85,6	85,9	86,1	86,1
	2	Tingkat efektivitas advokasi hukum			%	73,9	76,1	77,9	81,8	82,9	82,9
	3	Tingkat efektivitas penyusunan pertimbangan hukum			%	100	100	100	100	100	100
	4	Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum			%	73,9	76,1	77,9	81,8	82,9	82,9
	5	Tingkat efektivitas penyusunan perjanjian			%	73,9	76,1	77,9	81,8	82,9	82,9
	6	Tingkat efektivitas penyebarluasan produk hukum			%	25	50	75	100	100	100
PELAKSANA: Biro Hukum											
KEGIATAN 7: Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik											
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya penyelenggaraan komunikasi publik di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman											
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman					%	88,4	88,9	89,5	90,0	90,6	90,6
SUB INDIKATOR:											
	1	Tingkat layanan kepegawaian dan umum			%	85,1	85,4	85,6	85,9	86,1	86,1



KEGIATAN		SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	2	Tingkat sentimen positif pemberitaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	71	72,5	74	75,5	77	77
	3	Tingkat pelayanan publik Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	100	100	100	100	100	100
	4	Tingkat layanan informasi	%	100	100	100	100	100	100
PELAKSANA: Biro Komunikasi Publik									
KEGIATAN 8: Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi									
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Layanan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi									
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat Layanan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi			%	75,9	81,0	85,1	89,2	94,2	94,2
SUB INDIKATOR:									
	1	Tingkat layanan kepegawaian dan umum	%	85,1	85,4	85,6	85,9	86,1	86,1
	2	Tingkat Layanan Manajemen Data Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	75	80	85	90	95	95
	3	Tingkat Layanan Pengembangan Sistem Informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	70	75	80	85	90	90
	4	Tingkat Layanan Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi Kementerian PKP	%	78	85	88,5	92	98,5	98,5
PELAKSANA: Pusat Data dan Informasi									
KEGIATAN 9: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi									
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kualitas pengelolaan pengembangan kompetensi									
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat layanan pengembangan kompetensi ASN Kementerian PKP			%	67,9	75,8	83,6	91,5	100	100
SUB INDIKATOR:									
	1	Tingkat layanan kepegawaian	%	100	100	100	100	100	100
	2	Tingkat penyusunan MoU dengan lembaga dalam rangka pengembangan kompetensi bidang PKP	%	100	100	100	100	100	100
	3	Tingkat penyusunan NSPK, kurikulum, dan modul pengembangan kompetensi bidang PKP	%	100	100	100	100	100	100
	4	Tingkat layanan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian PKP	%	19,7	39,4	59,1	78,8	100	100
PELAKSANA: Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia									
KEGIATAN 10: Penyelenggaraan Pengembangan Talenta									
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kualitas pengelolaan pengembangan talenta									
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat layanan pengembangan talenta ASN Kementerian PKP			%	79,3	84,2	89	93,9	99,1	99,1
SUB INDIKATOR:									
	1	Tingkat layanan umum	%	80,1	80,5	80,8	81,1	81,5	81,5
	2	Tingkat efektivitas penyusunan NSPK Pengembangan Talenta	%	100	100	100	100	100	100
	3	Tingkat layanan pengelolaan penilaian kompetensi, pemetaan karier, dan manajemen kinerja	%	71,9	78,8	85,7	92,6	100	100
PELAKSANA: Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia									

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Matriks Kinerja dan Metode Perhitungan Renstra Setjen Tahun 2025-2029

Rincian target kinerja beserta metode perhitungannya tercantum pada Lampiran I

Matriks Kinerja dan Pendanaan serta Lampiran II Metode Perhitungan.



IV.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai target kinerja, Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memerlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan dari sarana dan prasarana yang

memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Mengenai kebutuhan pendanaan dalam melaksanakan kinerja dijabarkan sampai dengan tahun 2029 sebagai berikut:

Tabel IV. 3 Indikasi Kebutuhan Pendanaan Sekretariat Jenderal 2025-2029 per Kegiatan

KEGIATAN		ANGGARAN (Rp Ribu)					
		2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
1	Perencanaan dan Kerja Sama	942.000	12.600.000	13.230.000	13.891.500	14.586.075	55.249.575
2	Pengelolaan dan Pengadministrasian Pegawai, Organisasi dan Tatalaksana	1.085.878	1.988.817	2.683.226	3.904.838	5.737.257	15.400.016
3	Pengelolaan Keuangan dan BMN	1.481.705	5.251.680	5.514.264	5.789.977	6.079.476	24.117.102
4	Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi	349.200	2.445.695	2.567.980	2.696.379	2.831.198	10.890.451
5	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	563.835.108	1.589.886.670	1.669.381.004	1.752.850.054	1.840.492.557	7.416.445.393
6	Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Serta Advokasi Hukum	925.228	3.600.000	3.780.000	3.969.000	4.167.450	16.441.678
7	Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik	3.216.972	6.563.632	6.891.814	7.236.404	7.598.224	31.507.047
8	Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi	616.928	4.500.000	4.725.000	4.961.250	5.209.313	20.012.491
9	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	370.106	5.000.000	5.250.000	5.512.500	5.788.125	21.920.731
10	Penyelenggaraan Pengembangan Talenta	520.106	3.302.017	3.467.118	3.640.474	3.822.497	14.752.212
TOTAL		573.343.231	1.635.138.511	1.717.490.405	1.804.452.376	1.896.312.172	7.626.736.696

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Matriks Kinerja dan Metode Perhitungan Renstra Setjen Tahun 2025-2029

Rincian kerangka pendanaan setiap Indikator Kinerja Kegiatan tercantum pada

Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan.





BAB V PENUTUP

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Kementerian PKP mengamanatkan agar setiap pimpinan entitas menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 2025-2029 merupakan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal sebagai turunan dari Peraturan Menteri PKP Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029, serta merupakan arahan kebijakan yang akan dijabarkan ke dalam rencana kegiatan di setiap Unit Kerja (Eselon 2) di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Melalui dukungan 7 (tujuh) biro dan 2 (dua) pusat, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal semakin berkualitas, akuntabel, efektif, dan terdepan sehingga dapat mendukung salah satu tujuan Kementerian

Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian PKP.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Sekretariat Jenderal ikut berkontribusi mendukung pelaksanaan salah satu program Kementerian, yaitu Program Dukungan Manajemen yang selanjutnya dijabarkan ke dalam 10 (sepuluh) kegiatan. Alokasi kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Program Dukungan Manajemen pada periode Tahun 2025-2029 adalah sebesar Rp 4.173.557.924.201,-.

Melalui pelaksanaan kegiatan unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dengan dukungan anggaran yang cukup, diharapkan dapat mendukung peningkatan capaian kinerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bermuara pada peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi. Selanjutnya, Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029 perlu dijabarkan ke dalam rencana strategis unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian PKP.



An aerial photograph of a residential development, likely a housing project. The image shows several rows of small, single-story houses with dark roofs, arranged in a grid-like pattern. A road runs alongside the houses. In the background, there are mountains and a body of water. The entire image is overlaid with a semi-transparent teal color.

LAMPIRAN 1 MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

PROGRAM/ KEGIATAN			SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Rp)							
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UNIT ORGANISASI: SEKRETARIAT JENDERAL																
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN																
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian PKP																
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS: Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP			%	84.9	86.7	88.5	90.3	91.8	91.8							
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PKP																
INDIKATOR KINERJA PROGRAM: Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PKP			%	80.4	84.0	87.7	91.1	94.1	94.1	573,343,231,400	833,960,176,224	876,253,152,685	921,153,261,795	968,848,102,097	4,173,557,924,201	
KEGIATAN 1: Perencanaan dan Kerja Sama																
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya layanan pengelolaan perencanaan dan kerja sama																
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat layanan pengelolaan perencanaan dan kerja sama			%	92.6	93.2	93.8	94.5	95.1	95.1	942,000,000	4,700,000,000	4,935,000,000	5,181,750,000	5,440,837,500	21,199,587,500	
SUB INDIKATOR:																
1 Tingkat layanan kepegawaian dan umum			%	91.1	91.3	91.5	91.7	91.9	91.9							
2 Tingkat kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran			%	75	78	81	84	87	87							
3 Tingkat Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Kementerian PKP, Sekretariat Jenderal, dan Biro Perencanaan dan Kerja Sama			%	92.2	92.3	92.4	92.5	92.6	92.6							
4 Tingkat pelaporan pemantauan dan evaluasi yang lengkap dan terkini			%	100	100	100	100	100	100							
5 Tingkat layanan kerja sama bidang PKP yang efektif			%	100	100	100	100	100	100							
PELAKSANA: BIRO PERENCANAAN DAN KERJA SAMA																
OUTPUT:																
1 EBA–Layanan Dukungan Manajemen Internal																
EBA.962-Layanan Umum			Layanan	1	1	1	1	1	5	92,000,000	250,000,000	262,500,000	275,625,000	289,406,250	1,169,531,250	
2 EBC–Layanan Manajemen SDM Internal																
EBA.954-Layanan Manajemen SDM			Layanan	1	1	1	1	1	5	-	500,000,000	525,000,000	551,250,000	578,812,500	2,155,062,500	
3 EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal																
EBD.952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran			Layanan	1	1	1	1	1	5	450,000,000	2,000,000,000	2,100,000,000	2,205,000,000	2,315,250,000	9,070,250,000	
EBD.953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi			Laporan	1	1	1	1	1	5	200,000,000	1,200,000,000	1,260,000,000	1,323,000,000	1,389,150,000	5,372,150,000	
4 AEC-Kerja Sama																
AEC.001-Kerja Sama Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman			Kesepakatan	1	1	1	1	1	5	200,000,000	750,000,000	787,500,000	826,875,000	868,218,750	3,432,593,750	
KEGIATAN 2: Pengelolaan dan Pengadministrasian Pegawai, Organisasi dan Tatalaksana																
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya layanan pengelolaan dan pengadministrasian pegawai, organisasi dan tata laksana Kementerian PKP																
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat layanan pengelolaan pengadministrasian pegawai, organisasi dan tata laksana			%	71.5	76.0	80.6	85.1	89.6	89.6	1,085,878,000	1,988,817,000	2,683,225,500	3,904,838,250	5,737,257,375	15,400,016,125	
SUB INDIKATOR:																
1 Tingkat layanan kepegawaian dan umum			%	85.1	85.4	85.6	85.9	86.1	86.1							
2 Tingkat kualitas layanan manajemen SDM Kementerian PKP			%	70	75	80	85	90	90							
3 Tingkat kesesuaian kelembagaan			%	70	75	80	85	90	90							



PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp)					
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PELAKSANA: BIRO SUMBER DAYA MANUSIA. ORGANISASI DAN TATA LAKSANA														
	OUTPUT:													
1	EBA–Layanan Dukungan Manajemen Internal													
	EBA.960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5	600,800,000	625,000,000	870,000,000	1,425,000,000	2,250,000,000	5,770,800,000
	EBA.962-Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5	285,878,000	350,500,000	575,000,000	775,000,000	1,025,000,000	3,011,378,000
2	EBC–Layanan Manajemen SDM Internal													
	EBC.954-Layanan Manajemen SDM	Laporan	1	1	1	1	1	5	199,200,000	653,317,000	998,225,500	1,464,838,250	2,222,257,375	5,537,838,125
3	EBD–Layanan Manajemen Kinerja Internal													
	EBD.961-Layanan Reformasi Kinerja	Laporan	1	1	1	1	1	5	-	360,000,000	240,000,000	240,000,000	240,000,000	1,080,000,000
KEGIATAN 3: Pengelolaan Keuangan dan BMN														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya layanan pengelolaan Keuangan dan BMN														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat layanan pengelolaan Keuangan dan BMN		%	83.27	84.89	86.63	88.30	90.01	90.01	1,481,705,000	5,251,680,000	5,514,264,000	5,789,977,200	6,079,476,060	24,117,102,260
	SUB INDIKATOR:													
1	Tingkat layanan kepegawaian dan umum	%	85.1	85.4	85.6	85.9	86.1	86.1						
2	Tingkat kualitas layanan perbendaharaan dan PNPB	%	77.3	83.6	89	94.5	100	100						
3	Tingkat kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian	%	88.2	88.5	90	91.4	92.9	92.9						
4	Tingkat kualitas laporan keuangan Kementerian	%	88.9	90.2	91.5	92.8	94.2	94.2						
5	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP	%	92	92	92	92	92	92						
6	Persentase tindak lanjut rekomendasi atas temuan LHP BPK-RI	%	98.9	98.9	99	99.2	99.3	99.3						
7	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	72.3	74.2	76.6	78.5	80.6	80.6						
8	Tingkat efektivitas penatausahaan, pemanfaatan dan penertiban BMN	%	66.7	69.7	72.7	75.7	78.7	78.7						
PELAKSANA: BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA														
	OUTPUT:													
1	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal													
	EBA.955-Pengelolaan BMN Kementerian	Layanan	1	1	1	1	1	5	375,000,000	1,799,680,000	1,889,664,000	1,984,147,200	2,083,354,560	8,131,845,760
	EBA.956-Layanan BMN	Layanan	1	1	1	1	1	5	50,000,000	480,000,000	504,000,000	529,200,000	555,660,000	2,118,860,000
	EBA.962-Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5	272,000,000	272,000,000	285,600,000	299,880,000	314,874,000	1,444,354,000
2	EBC–Layanan Manajemen SDM Internal													
	EBC.954-Layanan Manajemen SDM	Layanan	1	1	1	1	1	5	160,000,000	160,000,000	168,000,000	176,400,000	185,220,000	849,620,000
3	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal													
	EBD.955-Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	2	5	5	5	5	22	624,705,000	2,540,000,000	2,667,000,000	2,800,350,000	2,940,367,500	11,572,422,500
KEGIATAN 4: Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa		%	98.5	98.5	98.6	98.6	98.6	98.6	349,200,000	2,445,695,000	2,567,979,750	2,696,378,738	2,831,197,675	10,890,451,163
	SUB INDIKATOR:													
1	Tingkat layanan kepegawaian dan umum	%	85.1	85.4	85.6	85.9	86.1	86.1						
2	Persentase pelaksanaan layanan tender	%	100	100	100	100	100	100						
3	Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi paket pengadaan konstruksi	%	100	100	100	100	100	100						
PELAKSANA: BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA														



PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp)					
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	OUTPUT:													
	1 EBA–Layanan Dukungan Manajemen Internal													
	EBA.962-Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5	349,200,000	1,942,433,000	2,039,554,650	2,141,532,383	2,248,609,002	8,721,329,035
	2 FAE–Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan													
	FAE.001-Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Barang dan Jasa	Layanan	1	1	1	1	1	5	-	181,176,000	190,234,800	199,746,540	209,733,867	780,891,207
	3 EBC–Layanan Manajemen SDM Internal													
	EBC.954-Layanan Manajemen SDM	Layanan	1	1	1	1	1	5		322,086,000	338,190,300	355,099,815	372,854,806	1,388,230,921
KEGIATAN 5: Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat dukungan manajemen Sekretariat Jenderal														
	SUB INDIKATOR													
	1 Tingkat layanan kepegawaian dan umum	%	85.1	85.4	85.6	85.9	86.1	86.1						
	2 Tingkat layanan kesehatan dan fasilitas penyelenggaraan urusan perkantoran, dan angkutan sumber daya manusia	%	85	90	100	100	100	100						
	3 Tingkat kualitas pemeliharaan dan pengelolaan utilitas, bangunan gedung, rumah jabatan, serta sarana dan prasarana lingkungan	%	85	90	100	100	100	100						
	4 Tingkat kualitas pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan	%	84.2	85.3	86.5	87.7	89.9	89.9						
	5 Tingkat layanan tata usaha dan rumah tangga Menteri dan Wakil Menteri	%	85.1	85.4	85.6	85.9	86.1	86.1						
	6 Tingkat layanan tata usaha dan rumah tangga Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, dan Staf Khusus	%	65.4	71.8	76.8	81.8	86.3	86.3						
	7 Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas, persuratan, kearsipan Kementerian, dan pengelolaan ketatausahaan BMN Biro Umum	%	33.3	46.67	73.3	86.66	100	100						
	8 Tingkat layanan fasilitas pembinaan protokoler Kementerian	%	100	100	100	100	100	100						
PELAKSANA: BIRO UMUM														
	OUTPUT:													
	1 EBA–Layanan Dukungan Manajemen Internal													
	EBA.994-Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	561,296,122,000	768,304,683,952	806,719,918,150	847,055,914,057	889,408,709,760	3,872,785,347,919
	EBA.956-Layanan BMN	Layanan	1	1	1	1	1	5	0	10,000,000	10,500,000	11,025,000	11,576,250	43,101,250
	EBA.959-Layanan Protokoler	Layanan	1	1	1	1	1	5	300,000,000	17,976,118,472	18,874,924,396	19,818,670,615	20,809,604,146	77,779,317,629
	EBA.962-Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5	917,173,000	3,000,000,000	3,150,000,000	3,307,500,000	3,472,875,000	13,847,548,000
	2 EBB–Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
	EBB.951-Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	1	1	1	5	1,321,813,000	6,997,532,800	7,347,409,440	7,714,779,912	8,100,518,908	31,482,054,060
	3 EBC–Layanan Manajemen SDM Internal													
	EBC.954-Layanan Manajemen SDM	Layanan	1	1	1	1	1	5	0	320,000,000	336,000,000	352,800,000	370,440,000	1,379,240,000
KEGIATAN 6: Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Serta Advokasi Hukum														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya fasilitasi produk hukum dan advokasi hukum yang progresif														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat layanan pembentukan produk hukum dan advokasi hukum														
		%	70.5	76.6	82.5	89.5	90.1	90.1	925,228,000	3,600,000,000	3,780,000,000	3,969,000,000	4,167,450,000	16,441,678,000



PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp)					
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	SUB INDIKATOR													
	1 Tingkat layanan kepegawaian dan umum	%	85.1	85.4	85.6	85.9	86.1	86.1						
	2 Tingkat efektivitas advokasi hukum	%	73.9	76.1	77.9	81.8	82.9	82.9						
	3 Tingkat efektivitas penyusunan pertimbangan hukum	%	100	100	100	100	100	100						
	4 Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum	%	73.9	76.1	77.9	81.8	82.9	82.9						
	5 Tingkat efektivitas penyusunan perjanjian	%	73.9	76.1	77.9	81.8	82.9	82.9						
	6 Tingkat efektivitas penyebarluasan produk hukum	%	25	50	75	100	100	100						
PELAKSANA: BIRO HUKUM														
	OUTPUT:													
	1 EBA–Layanan Dukungan Manajemen Internal													
	EBA.962-Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5	244,694,000	166,126,000	174,432,300	183,153,915	192,311,611	960,717,826
	EBA.957-Layanan Hukum	Layanan	1	1	1	1	1	5	622,294,000	1,350,707,000	1,418,242,350	1,489,154,468	1,563,612,191	6,444,010,008
	EBA.969-Layanan Bantuan Hukum	Layanan	1	1	1	1	1	5	58,240,000	1,483,167,000	1,557,325,350	1,635,191,618	1,716,951,198	6,450,875,166
	2 EBC–Layanan Manajemen SDM Internal													
	EBC.954-Layanan Manajemen SDM	Layanan	1	1	1	1	1	5	-	600,000,000	630,000,000	661,500,000	694,575,000	2,586,075,000
KEGIATAN 7: Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya penyelenggaraan komunikasi publik di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman														
		%	88.4	88.9	89.5	90.0	90.6	90.6	3,216,972,400	6,563,632,000	6,891,813,600	7,236,404,280	7,598,224,494	31,507,046,774
	SUB INDIKATOR													
	1 Tingkat layanan kepegawaian dan umum	%	85.1	85.4	85.6	85.9	86.1	86.1						
	2 Tingkat sentimen positif pemberitaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	71	72.5	74	75.5	77	77						
	3 Tingkat pelayanan publik Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	100	100	100	100	100	100						
	4 Tingkat layanan informasi	%	100	100	100	100	100	100						
PELAKSANA: BIRO KOMUNIKASI PUBLIK														
	OUTPUT:													
	1 EBA–Layanan Dukungan Manajemen Internal													
	EBA.962-Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5	190,984,400	190,984,000	200,533,200	210,559,860	221,087,853	1,014,149,313
	EBA.958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	1	1	1	1	1	5	386,952,000	705,963,000	741,261,150	778,324,208	817,240,418	3,429,740,775
	EBA.970-Penyelenggaraan Layanan Hubungan Media	Layanan	1	1	1	1	1	5	414,144,000	1,152,448,000	1,210,070,400	1,270,573,920	1,334,102,616	5,381,338,936
	EBA.971-Penyelenggaraan Layanan Hubungan Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah	Layanan	1	1	1	1	1	5	274,068,000	571,687,000	600,271,350	630,284,918	661,799,163	2,738,110,431
	EBA.972-Layanan Publikasi Melalui Penyelenggaraan Acara	Layanan	1	1	1	1	1	5	849,514,000	1,450,014,000	1,522,514,700	1,598,640,435	1,678,572,457	7,099,255,592
	EBA.973-Layanan Publikasi Melalui Media	Layanan	1	1	1	1	1	5	147,184,000	507,184,000	532,543,200	559,170,360	587,128,878	2,333,210,438
	EBA.974-Layanan Pelaporan Pimpinan	Layanan	1	1	1	1	1	5	252,464,000	604,856,000	635,098,800	666,853,740	700,196,427	2,859,468,967
	EBA.975-Pelayanan Publik	Layanan	1	1	1	1	1	5	488,002,000	603,682,000	633,866,100	665,559,405	698,837,375	3,089,946,880
	2 EBC–Layanan Manajemen SDM Internal													
	EBC.954-Layanan Manajemen SDM	Layanan	1	1	1	1	1	5	213,660,000	776,814,000	815,654,700	856,437,435	899,259,307	3,561,825,442
KEGIATAN 8: Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Layanan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat Layanan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi														
		%	75.9	81.0	85.1	89.2	94.2	94.2	616,928,000	4,500,000,000	4,725,000,000	4,961,250,000	5,209,312,500	20,012,490,500



PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp)					
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	SUB INDIKATOR													
	1 Tingkat layanan kepegawaian dan umum	%	85.1	85.4	85.6	85.9	86.1	86.1						
	2 Tingkat Layanan Manajemen Data Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	75	80	85	90	95	95						
	3 Tingkat Layanan Pengembangan Sistem Informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	70	75	80	85	90	90						
	4 Tingkat Layanan Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi Kementerian PKP	%	78	85	88.5	92	98.5	98.5						
PELAKSANA: PUSAT DATA DAN INFORMASI														
	OUTPUT:													
	1 EBA–Layanan Dukungan Manajemen Internal													
	EBA.962-Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5	188,094,000	400,000,000	420,000,000	441,000,000	463,050,000	1,912,144,000
	2 EBC–Layanan Manajemen SDM Internal													
	EBC.954-Layanan Manajemen SDM	Layanan	1	1	1	1	1	5	-	1,100,000,000	1,155,000,000	1,212,750,000	1,273,387,500	4,741,137,500
	3 BMA–Data dan Informasi Publik													
	BMA.001-Penyiapan Data dan Informasi	Dokumen	1	1	1	1	1	5	253,600,000	750,000,000	787,500,000	826,875,000	868,218,750	3,486,193,750
	4 CAN–Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi													
	CAN.001-Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Unit	0	1	1	1	1	4	-	303,700,000	318,885,000	334,829,250	351,570,713	1,308,984,963
	5 CBT–Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi													
	CBT.001-Pengadaan dan Pemeliharaan Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Unit	0	1	1	1	1	4	-	696,300,000	731,115,000	767,670,750	806,054,288	3,001,140,038
	6 FAB–Sistem Informasi Pemerintahan													
	FAB.001-Operasional Sistem Informasi	Sistem Informasi	1	1	1	1	1	5	175,234,000	1,250,000,000	1,312,500,000	1,378,125,000	1,447,031,250	5,562,890,250
KEGIATAN 9: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatkan kualitas pengelolaan pengembangan kompetensi														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat layanan pengembangan kompetensi ASN Kementerian PKP		%	67.9	75.8	83.6	91.5	100	100	370,106,000	5,000,000,000	5,250,000,000	5,512,500,000	5,788,125,000	21,920,731,000
	SUB INDIKATOR													
	1 Tingkat layanan kepegawaian	%	100	100	100	100	100	100						
	2 Tingkat penyusunan MoU dengan lembaga dalam rangka pengembangan kompetensi bidang PKP	%	100	100	100	100	100	100						
	3 Tingkat penyusunan NSPK, kurikulum, dan modul pengembangan kompetensi bidang PKP	%	100	100	100	100	100	100						
	4 Tingkat layanan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian PKP	%	19.7	39.4	59.1	78.8	100	100						
PELAKSANA: PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA														
	OUTPUT:													
	1 AEC–Kerja Sama													
	AEC.001-MoU dengan Lembaga	Kesepakatan	1	1	1	1	1	5	-	500,000,000	525,000,000	551,250,000	578,812,500	2,155,062,500
	2 AFA–Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria													
	AFA.001-NSPK, Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Pengembangan Kompetensi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	NSPK	1	1	1	1	1	5	-	500,000,000	525,000,000	551,250,000	578,812,500	2,155,062,500
	3 EBC–Layanan Manajemen SDM Internal													



PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp)					
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	EBC.996-Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Layanan	1	1	1	1	1	5	-	3,500,000,000	3,675,000,000	3,858,750,000	4,051,687,500	15,085,437,500
	EBC.954-Layanan Manajemen SDM	Layanan	1	1	1	1	1	5	370,106,000	500,000,000	525,000,000	551,250,000	578,812,500	2,525,168,500
KEGIATAN 10: Penyelenggaraan Pengembangan Talenta														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatkan kualitas pengelolaan pengembangan talenta														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat layanan pengembangan talenta ASN Kementerian PKP		%	79.3	84.2	89	\$93.9	99.1	99.1	520,106,000	3,302,017,000	3,467,117,850	3,640,473,743	3,822,497,430	14,752,212,022
SUB INDIKATOR														
1	Tingkat layanan umum	%	80.1	80.5	80.8	81.1	81.5	81.5						
2	Tingkat efektivitas penyusunan NSPK Pengembangan Talenta	%	100	100	100	100	100	100						
3	Tingkat layanan pengelolaan penilaian kompetensi, pemetaan karier, dan manajemen kinerja	%	71.9	78.8	85.7	92.6	100	100						
PELAKSANA: PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA														
OUTPUT:														
1	EBA–Layanan Dukungan Manajemen Internal													
	EBA.962-Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5	150,000,000	1,165,850,000	1,224,142,500	1,285,349,625	1,349,617,106	5,174,959,231
2	AFA–Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria													
	AFA.001-NSPK Pengembangan Talenta	NSPK	1	1	1	1	1	5	370,106,000	763,956,000	802,153,800	842,261,490	884,374,565	3,662,851,855
3	EBC–Layanan Manajemen SDM Internal													
	EBC.001-Penilaian, Pemetaan, dan Manajemen Kinerja	Layanan	1	1	1	1	1	5	-	1,372,211,000	1,440,821,550	1,512,862,628	1,588,505,759	5,914,400,936

Sumber:

- 1) Berita Acara Kesepakatan Matriks Kinerja dan Metode Perhitungan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029 tanggal 15 Mei 2025
- 2) Berita Acara Kesepakatan Matriks Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029 nomor 003/BA/Sr/2025.



An aerial photograph of a residential development, likely a housing estate or a new town. The image shows several rows of small, single-story houses with dark roofs, arranged in a grid-like pattern. A wide road runs alongside the houses. In the background, there are mountains and a body of water. The entire image is overlaid with a semi-transparent teal color.

LAMPIRAN 2 METODE PERHITUNGAN

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	KRO/RO	Output	SUB INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SS	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian PKP	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP			1	Tingkat kepuasan layanan administrasi Kementerian PKP	Kontribusi dari setiap Unit Organisasi pada Kementerian PKP : (70%) a. Sekretariat Jenderal (60%) b. Seluruh Unit Organisasi (30%) c. Balai (10%)	Internal dan Eksternal
					2	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PKP		



SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	KRO/RO	Output	SUB INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
							Statistik (1%) 11. Opini BPK (3%) 12. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK (2%) 13. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (1%) 14. Indeks Pengelolaan Aset (1%) 15. Survei Kepuasan Masyarakat (5%) 16. Indeks Pelayanan Publik (1%) 17. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (1%)		
SP	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PKP	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PKP					Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: 1. Tingkat layanan pengelolaan perencanaan dan Kerja Sama (10%) 2. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai (10%) 3. Tingkat Layanan Pengelolaan Keuangan dan BMN (10%) 4. Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa (10%) 5. Tingkat dukungan manajemen Sekretariat Jenderal (10%) 6. Tingkat layanan pembentukan produk hukum dan advokasi hukum (10%) 7. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (10%) 8. Tingkat Layanan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi (10%)		Internal dan Eksternal



SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	KRO/RO	Output	SUB INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
							9. Tingkat layanan pengembangan kompetensi ASN Kementerian PKP (10%) 10. Tingkat layanan pengembangan talenta ASN Kementerian PKP (10%)		
SK-1	Meningkatnya layanan pengelolaan perencanaan dan Kerja Sama	Tingkat layanan pengelolaan perencanaan dan Kerja Sama			Komposit dari indikator-indikator sebagai berikut:		Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut:	Dihitung setiap tahun	Data Internal dan Eksternal
			KRO: EBA–Layanan Dukungan Manajemen Internal RO: EBA.962-Layanan Umum KRO: EBC–Layanan Manajemen SDM Internal RO: EBA.954-Layanan Manajemen SDM	1. Tingkat layanan administrasi SDM Biro Perencanaan dan Kerja Sama 2. Tingkat layanan administrasi keuangan, BMN, Tata Persuratan, Kearsipan, dan Kerumahtanggaan Biro Perencanaan dan Kerja Sama 3. Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Biro Perencanaan dan Kerja Sama 4. Jumlah Laporan Manajemen Risiko Biro Perencanaan dan Kerja Sama	1.	Tingkat layanan kepegawaian dan umum	-	Indikator 1: (10%)	
							a.	Jumlah laporan terkait kepegawaian dan umum yang telah diselesaikan dibagi dengan jumlah total laporan yang wajib disusun (50%)	
							b.	Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja (20%)	
							c.	Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko Unit Kerja (10%)	
			KRO: EBD–Layanan Manajemen Kinerja Internal RO: EBD.952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1. Jumlah DIPA Awal Kementerian PKP 2. Tingkat keberhasilan pengajuan usulan revisi DIPA yang disetujui oleh Kementerian Keuangan	2.	Tingkat kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran (%)	-	Indikator 2: Tingkat kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan alokasi anggaran dan rencana penarikan dana yang ditetapkan dalam DIPA (20%)	
					3.		-	Indikator 3: (20%)	



SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	KRO/RO	Output	SUB INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN		TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
			KRO: EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal RO: EBD.953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1. Jumlah Dokumen Renstra dan Reviu Renstra Kementerian, Sekretariat Jenderal, dan Biro Perencanaan dan Kerja Sama 2. Jumlah Perjanjian Kinerja Menteri, Sekretaris Jenderal serta Kepala Biro-Kepala Bagian-Kepala Subbagian di lingkungan Biro Perencanaan dan Kerja Sama 3. Jumlah Rencana Aksi Kementerian, Sekretariat Jenderal, dan Biro Perencanaan dan Kerja Sama 4. Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulanan Kementerian, Sekretariat Jenderal, dan Biro Perencanaan dan Kerja Sama 5. Jumlah Laporan Kinerja Kementerian, Sekretariat Jenderal, dan Biro Perencanaan dan Kerja Sama 6. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal	Tingkat Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Kementerian PKP, Sekretariat Jenderal, dan Biro Perencanaan dan Kerja Sama (%)	a.	Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan (80%)		
						b.	Nilai Evaluasi Implementasi AKIP:		
						i)	Kementerian (10%)		
						ii)	Sekretariat Jenderal (5%)		
						iii)	Biro Perencanaan dan Kerja Sama (5%)		



SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	KRO/RO	Output	SUB INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN				TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)		(6)				(7)	(8)
				dan Biro Perencanaan dan Kerja Sama								
				1. Jumlah Laporan Pemantauan Progres Kegiatan Kementerian PKP 2. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Tematik Kementerian PKP	4.	Tingkat pelaporan pemantauan dan evaluasi yang lengkap dan terkini (%)	-	Indikator 4: Data pelaporan pemantauan berkala yang lengkap dan terkini (20%)				
			KRO: AEC-Kerja Sama RO: AEC.001-Kerja Sama Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Jumlah layanan kerja sama 2. Jumlah layanan pertemuan dan forum kerja sama internasional 3. Jumlah layanan usulan pembiayaan sektor perumahan	5.	Tingkat layanan kerja sama bidang PKP yang efektif (%)	-	Indikator 5: Jumlah layanan kerja sama bidang PKP yang berjalan dibagi dengan layanan kerja sama bidang PKP yang direncanakan (30%)				
SK-2	Meningkatnya layanan pengelolaan dan pengadministrasian pegawai, organisasi dan tata laksana Kementerian PKP	Tingkat layanan pengelolaan pengadministrasian pegawai organisasi dan tata laksana			Komposit dari indikator-indikator sebagai berikut:		Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut:				Dihitung setiap tahun	Data Internal dan Eksternal
			KRO: EBA–Layanan Dukungan Manajemen Internal RO: EBA.962-Layanan Umum	1. Tingkat layanan administrasi SDM Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana 2. Tingkat layanan administrasi keuangan, BMN, Tata Persuratan, Kearsipan, dan Kerumahtanggaan Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	1.	Tingkat layanan kepegawaian dan umum	-	Indikator 1: (10%)				
			KRO: EBC–Layanan Manajemen SDM Internal RO: EBC.954-Layanan Manajemen SDM					a.	Jumlah laporan terkait kepegawaian dan umum yang telah diselesaikan dibagi dengan jumlah total laporan yang wajib disusun (50%)			
								b.	Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja (20%)			
								c.	Nilai Evaluasi Implementasi AKIP Unit Kerja (20%)			
							d.	Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko Unit Kerja (10%)				



SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	KRO/RO	Output	SUB INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN			TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
				3. Jumlah Dokumen Renstra dan Reviu Renstra Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana 4. Jumlah Perjanjian Kinerja Kepala Biro-Kepala Bagian-Kepala Subbagian di lingkungan Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana 5. Jumlah Rencana Aksi Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana 6. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kinerja triwulanan Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana 7. Jumlah Laporan Kinerja Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana 8. Tingkat Layanan data dan informasi Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana 9. Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Biro Sumber						



SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	KRO/RO	Output	SUB INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN		TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
				Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana 10. Jumlah Laporan Manajemen Risiko Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana					
				KRO: EBA–Layanan Dukungan Manajemen Internal RO: EBA.960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal KRO: EBD–Layanan Manajemen Kinerja Internal RO: EBD.961-Layanan Reformasi Kinerja	1. Jumlah Laporan pengelolaan administrasi SDM Kementerian PKP (layanan KP, Pensiun, Mutasi, Data/Profil SDM, Gaji, Tukin, dll) 2. Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Pegawai (Pola Karier, Disiplin, Kode Etik, Penghargaan)	2. Tingkat kualitas layanan manajemen SDM Kementerian PKP(%)	- Indikator 2: Laporan hasil survey layanan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Kementerian PKP (50%)		
				1. Jumlah Laporan Pengembangan Kelembagaan 2. Jumlah Laporan Pengembangan Manajemen Jabatan Fungsional	3. Tingkat kesesuaian kelembagaan (%)	-	Indikator 3: (40%)		
						a.	Laporan hasil survei pegawai di lingkungan Kementerian PKP untuk menilai efektivitas organisasi dan efisiensi pelaksanaan tugas fungsi (50%)		
						b.	Laporan hasil survey layanan pengelolaan pejabat fungsional bidang PKP terkait tingkat kualitas pengelolaan jabatan fungsional (50%)		
SK-3	Meningkatnya layanan	Tingkat layanan pengelolaan			Komposit dari indikator-indikator sebagai berikut:	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan		Dihitung setiap tahun	Data Internal



SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	KRO/RO	Output	SUB INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN		TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)
	pengelolaan Keuangan dan BMN	Keuangan dan BMN					pembobotan (%) sebagai berikut:			dan Eksternal
			KRO: EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal RO: EBA.962-Layanan Umum KRO: EBC–Layanan Manajemen SDM Internal RO: EBC.954-Layanan Manajemen SDM	1. Tingkat layanan administrasi SDM Biro Keuangan dan BMN 2. Tingkat layanan administrasi keuangan, BMN, Tata Persuratan, Kearsipan, dan Kerumahtanggaan Biro Keuangan dan BMN 3. Jumlah Dokumen Renstra dan Reviu Renstra Biro Keuangan dan BMN 4. Jumlah Perjanjian Kinerja Kepala Biro-Kepala Bagian-Kepala Subbagian di lingkungan Biro Keuangan dan BMN 5. Jumlah Rencana Aksi Kinerja Biro Keuangan dan BMN 6. Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulanan Biro Keuangan dan BMN 7. Jumlah Laporan Kinerja Biro Keuangan dan BMN 8. Tingkat layanan data dan informasi Biro Keuangan dan BMN 9. Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Biro Keuangan dan BMN	1.	Tingkat layanan kepegawaian dan umum satuan kerja	-	Indikator 1: (10%)		
							a.	Jumlah laporan terkait kepegawaian dan umum yang telah diselesaikan dibagi dengan jumlah total laporan yang wajib disusun (50%)		
							b.	Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja (20%)		
							c.	Nilai Evaluasi Implementasi AKIP Unit Kerja (20%)		
d.	Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko Unit Kerja (10%)									



SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	KRO/RO	Output	SUB INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN		TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)
				10. Jumlah Laporan Manajemen Risiko Biro Keuangan dan BMN						
				KRO: EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal RO: EBD.955-Layanan Manajemen Keuangan	2	Tingkat kualitas layanan perbendaharaan dan PNBP (%)	-	Indikator 2: (10%)		
							a.	Persentase Pejabat Perbendaharaan Tersertifikasi (50%)		
							b.	Persentase ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara (35%)		
							c.	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan PNBP yg tepat waktu (15%)		
					3	Tingkat kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian (%)	-	Indikator 3: (10%)		
							a.	Nilai IKPA Sekretariat Jenderal berdasarkan aplikasi MONEV-PA (60%)		
							b.	Persentase jumlah total pagu dikurangi dengan nilai pagu minus di Kementerian (20%)		
							c.	Persentase pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran di Kementerian (20%)		
					4	Tingkat kualitas laporan keuangan Kementerian (%)	-	Indikator 4: (15%)		
							a.	Kesesuaian dengan SAP berdasarkan hasil pemantauan E-		



SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	KRO/RO	Output	SUB INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN		TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)
				1 Sekretariat Jenderal 2. Jumlah Laporan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Kementerian PKP				Rekon LK <i>Unaudited</i> (40%)		
							b.	Kecukupan pengungkapan dalam LK berdasarkan hasil telaah LK (40%)		
							c.	Efektivitas SPI - Nilai PIPK Kementerian (20%)		
				1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Sekretariat Jenderal 2. Jumlah Laporan Manajemen Risiko Sekretariat Jenderal 3. Jumlah Laporan Hasil Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Sekretariat Jenderal	5	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP (%)	-	Indikator 5: (10%)		
							a.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja di lingkungan Setjen yang tepat waktu (60%)		
							b.	Terselenggaranya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Setjen (20%)		
							c.	Nilai Komponen Struktur dan Proses Maturitas SPIP Setjen (20%)		
				Konsolidasi TL LHP dan LHA Kementerian PKP	6	Persentase tindak lanjut rekomendasi atas temuan LHP BPK-RI (%)	-	Indikator 6: Dihitung berdasarkan persentase jumlah rekomendasi atas temuan BPK-RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah Rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI (15%)		
				KRO: EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal RO: EBA.955- Pengelolaan BMN	1. Jumlah Laporan RKBMN Kementerian 2. Jumlah Laporan Barang Pengguna	7	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN (%)	-	Indikator 7: (15%)	
								a.	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN yang dihitung berdasarkan (50%):	



SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	KRO/RO	Output	SUB INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN		TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)
			Kementerian EBA.956-Layanan BMN	3. Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian 4. Jumlah Laporan Progres Serah Terima Aset			i)	Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN (40%)		
							ii)	Ketepatan waktu penyampaian LBP (30%)		
							iii)	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal (30%)		
				1. Jumlah Laporan Tingkat Kesesuaian SBSK	8	Tingkat efektivitas penatausahaan,	-	b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN yang dihitung berdasarkan (50%): (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) x 100%		
								Indikator 8: Dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan		



SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	KRO/RO	Output	SUB INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
				2. Jumlah Laporan Capaian Penetapan Status Pengguna (PSP)		pemanfaatan dan penertiban BMN (%)	status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya (15%)		
SK-4	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa	Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa			Komposit dari indikator-indikator sebagai berikut:		Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut:	Dihitung setiap tahun	Data Internal dan Eksternal
			KRO: EBA–Layanan Dukungan Manajemen Internal RO: EBA.962-Layanan Umum	1. Tingkat layanan administrasi SDM Biro Pengadaan Barang dan Jasa 2. Tingkat layanan administrasi keuangan, BMN, Tata Persuratan, Kearsipan, dan Kerumahtanggaan Biro Pengadaan Barang dan Jasa 3. Jumlah Dokumen Renstra dan Reviu Renstra Biro Pengadaan Barang dan Jasa 4. Jumlah Perjanjian Kinerja Kepala Biro-Kepala Bagian-Kepala Subbagian di lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa 5. Jumlah Rencana Aksi Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa 6. Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1.	Tingkat layanan kepegawaian dan umum	- Indikator 1: (10%)		
							a. Jumlah laporan terkait kepegawaian dan umum yang telah diselesaikan dibagi dengan jumlah total laporan yang wajib disusun (50%)		
							b. Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja (20%)		
							c. Nilai Evaluasi Implementasi AKIP Unit Kerja (20%)		
							d. Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko Unit Kerja (10%)		



SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	KRO/RO	Output	SUB INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN		TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)
				7. Jumlah Laporan Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa 8. Tingkat layanan data dan informasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa 9. Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Biro Pengadaan Barang dan Jasa 10. Jumlah Laporan Manajemen Risiko Biro Pengadaan Barang dan Jasa						
				KRO: FAE-Pemantauan dan Evaluasi RO: FAE.001-Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Barang dan Jasa	2.	Persentase pelaksanaan layanan tender (%)	-	Indikator 2 : Jumlah pelaksanaan tender dibagi jumlah permintaan tender (45%)		
				Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Paket pengadaan konstruksi yang dilakukan	3.	Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi paket pengadaan konstruksi	-	Indikator 3: Jumlah paket pengadaan konstruksi yang dilakukan monitoring dan evaluasi dibagi dengan jumlah paket pengadaan yang menjadi target monitoring dan evaluasi (45%)		
	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa	Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa			Komposit dari indikator-indikator sebagai berikut:		Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut:		Dihitung setiap tahun	Data Internal dan Eksternal
			KRO: EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal RO: EBA.962-Layanan Umum	1. Tingkat layanan administrasi SDM Biro Pengadaan Barang dan Jasa 2. Tingkat layanan administrasi keuangan, BMN, Tata Persuratan,	1.	Tingkat layanan kepegawaian dan umum	-	Indikator 1: (10%) a. Jumlah laporan terkait kepegawaian dan umum yang telah diselesaikan dibagi dengan jumlah total laporan yang wajib disusun (50%)		



SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	KRO/RO	Output	SUB INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN			TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)	(8)
			KRO: EBC–Layanan Manajemen SDM Internal RO: EBC.954-Layanan Manajemen SDM	Kearsipan, dan Kerumahtanggaan Biro Pengadaan Barang dan Jasa 3. Jumlah Dokumen Renstra dan Reviu Renstra Biro Pengadaan Barang dan Jasa 4. Jumlah Perjanjian Kinerja Kepala Biro-Kepala Bagian-Kepala Subbagian di lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa 5. Jumlah Rencana Aksi Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa 6. Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa 7. Jumlah Laporan Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa 8. Tingkat layanan data dan informasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa 9. Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Biro Pengadaan Barang dan Jasa 10. Jumlah Laporan Manajemen Risiko Biro Pengadaan Barang dan Jasa			b.	Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja (20%)			
							c.	Nilai Evaluasi Implementasi AKIP Unit Kerja (20%)			
							d.	Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko Unit Kerja (10%)			



SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	KRO/RO	Output	SUB INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN		TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)
			KRO: EBA–Layanan Dukungan Manajemen Internal RO: EBA.962-Layanan Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Tender	2.	Persentase pelaksanaan layanan tender (%)	-	Indikator 2 : Jumlah pelaksanaan tender dibagi jumlah permintaan tender (45%)		
			KRO: EBD–Layanan Kinerja Manajemen Internal RO: EBD.953-Pemantauan dan Evaluasi	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Paket pengadaan konstruksi yang dilakukan	3.	Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi paket pengadaan konstruksi	-	Indikator 3: Jumlah paket pengadaan konstruksi yang dilakukan monitoring dan evaluasi dibagi dengan jumlah paket pengadaan yang menjadi target monitoring dan evaluasi (45%)		
SK-5	Meningkatnya dukungan manajemen manajemen Sekretariat Jenderal	Tingkat dukungan manajemen Sekretariat Jenderal			Komposit dari indikator-indikator sebagai berikut:		Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut:		Dihitung setiap tahun	Data Internal dan Eksternal
			KRO: EBC–Layanan Manajemen SDM Internal RO: EBC.954-Layanan Manajemen SDM	1. Layanan administrasi SDM Biro Umum 2. Layanan Administrasi Keuangan, BMN, Tata Persuratan, Kearsipan, dan Kerumahtanggaan Biro Umum 3. Jumlah Dokumen Renstra dan Reviu Renstra Biro Umum 4. Jumlah Perjanjian Kinerja Kepala Biro-Kepala Bagian-Kepala Subbagian di lingkungan Biro Umum 5. Jumlah Rencana Aksi Biro Umum 6. Jumlah Laporan Monitoring dan	1.	Tingkat layanan kepegawaian dan umum	-	Indikator 1: (10%)		
							a.	Jumlah laporan terkait kepegawaian dan umum yang telah diselesaikan dibagi dengan jumlah total laporan yang wajib disusun (50%)		
							b.	Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja (20%)		
							c.	Nilai Evaluasi Implementasi AKIP Unit Kerja (20%)		
							d.	Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko Unit Kerja (10%)		



SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	KRO/RO	Output	SUB INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN			TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA					
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)	(8)					
				Evaluasi Kinerja Triwulanan Biro Umum 7. Jumlah Laporan Kinerja Biro Umum 8. Tingkat Layanan data dan informasi Biro Umum 9. Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Biro Umum 10. Jumlah Laporan Manajemen Risiko Biro Umum												
				KRO: EBA–Layanan Dukungan Manajemen Internal RO: EBA.962-Layanan Umum EBA.994-Layanan Perkantoran EBA.956-Layanan BMN KRO: EBB–Layanan Sarana dan Prasarana Internal RO: EBB.951-Layanan Sarana Internal							1. Layanan kesehatan Sumber Daya Manusia 2. Layanan fasilitas penyelenggaraan urusan perkantoran 3. Layanan angkutan sumber daya manusia	2.	Tingkat layanan kesehatan dan fasilitas penyelenggaraan urusan perkantoran, dan angkutan sumber daya manusia (%)	-	Indikator 2: (10%)	
														a.	Jumlah perlengkapan P3K yang tersedia dibandingkan dengan perlengkapan P3K yang dibutuhkan (30%)	
														b.	Jumlah fasilitas urusan perkantoran yang terlayani dibandingkan dengan target jumlah permintaan urusan perkantoran (30%)	
														c.	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia dibandingkan dengan jumlah kendaraan dinas yang dibutuhkan (40%)	
				1. Jumlah laporan pemeliharaan dan pengelolaan utilitas 2. Jumlah laporan pemeliharaan dan pengelolaan bangunan gedung							3.	Tingkat kualitas pemeliharaan dan pengelolaan utilitas, bangunan gedung, rumah jabatan, serta sarana dan	-	Indikator 3: (10%)		
													a.	Jumlah laporan pemeliharaan dan pengelolaan utilitas yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan		



SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	KRO/RO	Output	SUB INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN		TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
				3. Jumlah laporan pemeliharaan dan pengelolaan rumah jabatan 4. Jumlah laporan pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan	prasarana lingkungan (%)		target pemeliharaan dan pengelolaan utilitas (25%)		
						b.	Jumlah laporan pemeliharaan dan pengelolaan Gedung Kantor Pusat yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target pemeliharaan dan pengelolaan Gedung Kantor Pusat (25%)		
						c.	Jumlah laporan pemeliharaan dan pengelolaan Rumah Jabatan yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target pemeliharaan dan pengelolaan Rumah Jabatan (25%)		
						d.	Jumlah laporan pemeliharaan sarana prasarana Gedung Kantor yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target pemeliharaan sarana prasarana Gedung Kantor (25%)		
				1. Tingkat pembinaan keamanan lingkungan Kementerian PKP 2. Tingkat pembinaan ketertiban lingkungan Kementerian PKP	4. Tingkat kualitas pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan (%)	-	Indikator 4: (10%)		
						a.	Persentase Gedung Kantor yang terpasang/terkelolanya CCTV dibandingkan dengan Target Gedung Kantor yang terpasang dan terkelolanya CCTV (50%)		



SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	KRO/RO	Output	SUB INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN		TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
						b.	Persentase jumlah pengaduan terkait keamanan dan ketertiban per Gedung Kantor yang terselesaikan dibandingkan dengan total keseluruhan pengaduan Per Gedung Kantor (50%)		
						-	Indikator 5: (15%)		
						a.	Jumlah surat Menteri yang diproses dibandingkan dengan total surat (30%)		
						b.	Jumlah usulan kebutuhan Menteri yang ditindak lanjuti, dibandingkan dengan total usulan kebutuhan Menteri (20%)		
						c.	Jumlah surat Wakil Menteri yang diproses dibandingkan dengan total surat (30%)		
						d.	Jumlah usulan kebutuhan Wakil Menteri yang ditindak lanjuti, dibandingkan dengan total usulan kebutuhan Wakil Menteri (20%)		
						-	Indikator 6: (15%)		
						a.	Jumlah surat Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, dan Staf Khusus yang diproses dibandingkan dengan total surat (30%)		
						b.	Jumlah usulan kebutuhan Sekretaris Jenderal yang ditindak		



SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	KRO/RO	Output	SUB INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN			TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)	(8)
								lanjuti, dibandingkan dengan total usulan kebutuhan Sekretaris Jenderal (20%)			
						c.	Jumlah surat Staf Ahli dan Staf Khusus yang diproses dibandingkan dengan total surat (30%)				
						d.	Jumlah usulan kebutuhan Staf Ahli dan Staf Khusus yang ditindak lanjuti, dibandingkan dengan total usulan kebutuhan Staf Ahli dan Staf Khusus (20%)				
				1. Layanan pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas Kementerian 2. Layanan pembinaan dan pengelolaan persuratan Kementerian 3. Layanan pembinaan dan pengelolaan kearsipan Kementerian 4. Layanan pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan BMN Biro Umum	7.	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas, persuratan, kearsipan Kementerian, dan pengelolaan ketatausahaan BMN Biro Umum (%)	-	Indikator 7: (15%)			
							a.	Persentase tata naskah dinas Unor yang terbina dan terkelola dibandingkan total seluruh tata naskah dinas Unor (20%)			
							b.	Persentase persuratan Unor yang terbina dan terkelola dibandingkan dengan total seluruh persuratan Unor (30%)			
							c.	Persentase arsip Unor yang terbina dan terkelola dibandingkan dengan total seluruh arsip unor (30%)			
							d.	Persentase ketatausahaan BMN Biro yang terbina dan terkelola dibandingkan total seluruh			



SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	KRO/RO	Output	SUB INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN		TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
							ketatausahaan BMN Biro (20%)		
			KRO: EBA–Layanan Dukungan Manajemen Internal RO: EBA.959-Layanan Protokoler	Layanan pembinaan protokoler Kementerian	8. Tingkat layanan fasilitas pembinaan protokoler Kementerian (%)	-	Indikator 8: (15%)		
						a.	Persentase terselenggaranya acara dan kegiatan pimpinan dengan baik dan lancar sesuai aturan dibandingkan dengan total seluruh acara yang diselenggarakan (100%)		
SK-6	Meningkatnya fasilitasi produk hukum dan advokasi hukum yang progresif	Tingkat layanan pembentukan produk hukum dan advokasi hukum	KRO: EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal RO: EBA.962-Layanan Umum KRO: EBC–Layanan Manajemen SDM Internal RO: EBC.954-Layanan Manajemen SDM	1. Layanan administrasi SDM Biro Hukum 2. Layanan Administrasi Keuangan, BMN, Tata Persuratan, Kearsipan, dan Kerumahtanggaan Biro Hukum 3. Jumlah Dokumen Renstra dan Reviu Renstra Biro Hukum 4. Jumlah Perjanjian Kinerja Kepala Biro-Kepala Bagian-Kepala Subbagian di lingkungan Biro Hukum 5. Jumlah Rencana Aksi Biro Hukum 6. Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja	Komposit dari indikator-indikator sebagai berikut: 1. Tingkat layanan Kepegawaian dan Umum	-	Indikator 1: (10%)	Dihitung setiap tahun	Data Internal dan Eksternal
						a.	Jumlah laporan terkait kepegawaian dan umum yang telah diselesaikan dibagi dengan jumlah total laporan yang wajib disusun (50%)		
						b.	Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja (20%)		
						c.	Nilai Evaluasi Implementasi AKIP Unit Kerja (20%)		
						d.	Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko Unit Kerja (10%)		



SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	KRO/RO	Output	SUB INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN		TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)
				Triwulanan Biro Hukum 7. Jumlah Laporan Kinerja Biro Hukum 8. Tingkat Layanan data dan informasi Biro Hukum 9. Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Biro Hukum 10. Jumlah Laporan Manajemen Risiko Biro Hukum						
				KRO: EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal RO: EBA.957-Layanan Hukum EBA.969-Layanan Bantuan Hukum	1. Jumlah layanan pemberian advokasi hukum 2. Jumlah laporan pembinaan advokasi hukum	2.	Tingkat efektivitas advokasi hukum (%)	-		
				Jumlah layanan pemberian pertimbangan hukum	3.	Tingkat efektivitas penyusunan pertimbangan hukum (%)	-	Indikator 2: Jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara yang harus ditangani (20%)		
				1. Jumlah layanan penyusunan produk hukum 2. Jumlah laporan pembinaan pembentukan peraturan perundang-undangan	4.	Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum (%)	-	Indikator 3: Jumlah usulan pertimbangan hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah pertimbangan hukum yang harus diselesaikan (20%)		
				Jumlah laporan penyebarluasan produk hukum	5.	Tingkat efektivitas penyebarluasan produk hukum (%)	-	Indikator 4: Jumlah produk hukum yang diproses legalisasinya dibagi dengan jumlah produk hukum yang seharusnya diproses legalisasinya (dalam Izin Prakarsa atau proleg Kementerian PKP) (20%)		
				Jumlah layanan penyusunan perjanjian	6.	Tingkat efektivitas penyusunan perjanjian (%)	-	Indikator 5: Hasil survei persepsi user terhadap kemudahan akses informasi hukum Kementerian PKP (10%)		
								Indikator 6: Jumlah usulan perjanjian yang terselesaikan dibagi		



SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	KRO/RO	Output	SUB INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN		TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
						dengan jumlah perjanjian yang seharusnya diselesaikan (20%)			
SK-7	Meningkatnya penyelenggaraan komunikasi publik di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman			Komposit dari indikator-indikator sebagai berikut:	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut:		Dihitung setiap tahun	Data Internal dan Eksternal
			KRO: EBA–Layanan Dukungan Manajemen Internal RO: EBA.962-Layanan Umum KRO: EBC–Layanan Manajemen SDM Internal RO: EBC.954-Layanan Manajemen SDM	1. Tingkat layanan administrasi SDM Biro Komunikasi Publik 2. Tingkat layanan administrasi keuangan, BMN, Tata Persuratan, Kearsipan, dan Kerumahtanggaan Biro Komunikasi Publik 3. Jumlah Dokumen Renstra dan Reviu Renstra Biro Komunikasi Publik 4. Jumlah Perjanjian Kinerja Kepala Biro-Kepala Bagian-Kepala Subbagian di lingkungan Biro Komunikasi Publik 5. Jumlah Rencana Aksi Biro Komunikasi Publik 6. Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulanan Biro Komunikasi Publik 7. Jumlah Laporan Kinerja Biro Komunikasi Publik 8. Tingkat Layanan data dan informasi	1. Tingkat layanan Kepegawaian dan Umum	-	Indikator 1: (10%)		
						a.	Jumlah laporan terkait kepegawaian dan umum yang telah diselesaikan dibagi dengan jumlah total laporan yang wajib disusun (50%)		
						b.	Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja (20%)		
						c.	Nilai Evaluasi Implementasi AKIP Unit Kerja (20%)		
						d.	Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko Unit Kerja (10%)		



SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	KRO/RO	Output	SUB INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN		TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)
				Biro Komunikasi Publik 9. Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Biro Komunikasi Publik 10. Jumlah Laporan Manajemen Risiko Biro Komunikasi Publik						
			KRO: EBA–Layanan Dukungan Manajemen Internal RO: EBA.958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi EBA.970-Penyelenggaraan Layanan Hubungan Media EBA.971-Penyelenggaraan Layanan Hubungan Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah EBA.972-Layanan Publikasi Melalui Acara EBA.973-Layanan Publikasi Melalui Media EBA.974-Layanan Pelaporan Pimpinan	1. Jumlah laporan pemberitaan positif Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di media 2. Jumlah laporan pengelolaan media sosial Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.	Tingkat sentimen positif pemberitaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (%)	-	Indikator 2: Persentase sentimen pemberitaan positif dan netral Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di media, dibandingkan dengan jumlah total pemberitaan (35%)		
				1. Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan hubungan antar lembaga dan informasi pimpinan 2. Jumlah laporan kerjasama dengan media masa	3.	Tingkat layanan informasi	-	Indikator 3: (20%) a. Jumlah Laporan penyelenggaraan hubungan antar lembaga dibagi dengan jumlah total laporan yang harus disusun b. Jumlah bahan informasi pimpinan yang disediakan dibagi dengan jumlah permintaan c. Jumlah laporan kerjasama media dibagi dengan jumlah total laporan yang harus disusun		
			KRO: EBA–Layanan Dukungan Manajemen Internal RO:	Laporan pelaksanaan pelayanan publik Kementerian Perumahan dan	4.	Tingkat pelayanan publik Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (%)	-	Indikator 4: Persentase jumlah pelayanan publik yang ditindaklanjuti terhadap pemohon pelayanan publik (35%)		



SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	KRO/RO	Output	SUB INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN		TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)
			EBA.975-Pelayanan Publik	Kawasan Permukiman						
SK-8	Meningkatnya layanan pengelolaan data dan teknologi informasi	Tingkat Layanan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi			Komposit dari indikator-indikator sebagai berikut:		Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut:		Dihitung setiap tahun	Data Internal dan Eksternal
			KRO: EBA–Layanan Dukungan Manajemen Internal	1. Tingkat layanan administrasi SDM Pusat Data dan Informasi 2. Tingkat layanan administrasi keuangan, BMN, Tata Persuratan, Kearsipan, dan Kerumahtanggaan Pusat Data dan Informasi 3. Jumlah Dokumen Renstra dan Reviu Renstra Pusat Data dan Informasi 4. Jumlah Perjanjian Kinerja Kepala Pusat-Kepala Bidang-Kepala Bagian di lingkungan Pusat Data dan Informasi 5. Jumlah Rencana Aksi Pusat Data dan Informasi 6. Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulanan Pusat Data dan Informasi 7. Jumlah Laporan Kinerja Pusat Data dan Informasi 8. Tingkat Layanan data dan informasi	1.	Tingkat layanan kepegawaian dan umum	-	Indikator 1: (10%)		
			RO: EBA.962-Layanan Umum				a.	Jumlah laporan terkait umum yang telah diselesaikan dibagi dengan jumlah total laporan yang wajib disusun (50%)		
			KRO: EBC–Layanan Manajemen SDM Internal				b.	Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja (20%)		
			RO: EBC.954-Layanan Manajemen SDM				c.	Nilai Evaluasi Implementasi AKIP Unit Kerja (20%)		
							d.	Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko Unit Kerja (10%)		



SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	KRO/RO	Output	SUB INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN		TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)
				Pusat Data dan Informasi 9. Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Pusat Data dan Informasi 10. Jumlah Laporan Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi						
			KRO: BMA–Data dan Informasi Publik RO: BMA.001-Penyiapan Data dan Informasi	1. Tersedianya Data Statistik Bidang PKP 2. Tersedianya Data Geospasial Bidang PKP	2.	Tingkat Layanan Manajemen Data Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	Indikator 2: Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap kebutuhan data (40%)		
			KRO: CAN–Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi RO: CAN.001-Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi KRO: CBT–Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi RO: CBT.001-Pengadaan dan Pemeliharaan Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1. Terlaksananya Pengembangan <i>Dashboard</i> Program 3 Juta Rumah 2. Terlaksananya Pengembangan Sistem MyPKP sebagai <i>SuperApp</i> Kementerian PKP 3. Terlaksananya Pengembangan <i>Website</i> Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 4. Jumlah ASN yang terfasilitasi <i>email</i> kedinasan Kementerian PKP	3	Tingkat Layanan Pengembangan Sistem Informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	Indikator 3: Tingkat Kepuasan Pengguna Sistem Informasi yang Dikembangkan (<i>Website</i> Kementerian PKP, MyPKP, SIBARU, dll.) (20%)		
				1. Fasilitasi penyediaan dan pemeliharaan jaringan internet	4.	Tingkat Layanan Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi Kementerian PKP	-	Indikator 4: (30%)		
							a.	Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Jaringan Internet pada Kantor Pusat (10%)		



SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	KRO/RO	Output	SUB INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
			KRO: FAB–Sistem Informasi Pemerintahan RO: FAB.001-Operasional Sistem Informasi	2. Tingkat fasilitasi <i>hosting server</i> sistem informasi yang diajukan unit kerja 3. Uji kerentanan aplikasi yang berada pada Layanan Hosting Server Kementerian PKP 4. Monitoring Keamanan Siber			b. Persentase jumlah aplikasi yang sudah dilakukan uji kerentanan dibandingkan total aplikasi (30%) c. Persentase fasilitasi hosting server sistem informasi dibandingkan total aplikasi (30%) d. Jumlah Laporan Monitoring Keamanan Siber (30%)		
SK-9	Meningkatnya kualitas pengelolaan pengembangan kompetensi	Tingkat layanan pengembangan kompetensi ASN Kementerian PKP			Komposit dari indikator-indikator sebagai berikut:		Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut:	Dihitung setiap tahun	Data Internal dan Eksternal
			KRO: EBC–Layanan Manajemen SDM Internal RO: EBC.954-Layanan Manajemen SDM	Tingkat layanan administrasi SDM Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.	Tingkat layanan kepegawaian	- Indikator 1: (5%)		
			KRO: AEC–Kerja Sama RO: AEC.001-MoU dengan Lembaga	Jumlah MoU dengan Lembaga dalam rangka pengembangan kompetensi bidang PKP yang telah disepakati	2.	Tingkat penyusunan MoU dengan lembaga dalam rangka pengembangan kompetensi bidang PKP (%)	- Indikator 2: Jumlah MoU yang telah dilakukan dengan lembaga dalam rangka pengembangan kompetensi bidang PKP (25%)		
			KRO: AFA–Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria RO: AFA.001-NSPK, Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Pengembangan	1. Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pengembangan kompetensi yang telah disusun 2. Jumlah kurikulum dan modul yang telah tersusun dan	3.	Tingkat penyusunan NSPK, kurikulum, dan modul pengembangan kompetensi bidang PKP (%)	- Indikator 3: (30%)		
							a. Jumlah NSPK yang telah disusun dibandingkan dengan target penyusunan NSPK (30%) b. Jumlah Kurikulum dan Modul Pelatihan yang telah disusun		



SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	KRO/RO	Output	SUB INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN			TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)	(8)
			Kompetensi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	dilaksanakan dalam pelatihan					dibandingkan dengan target penyusunan kurikulum dan modul (70%)		
			KRO: EBC–Layanan Manajemen SDM Internal RO: EBC.996-Layanan Pendidikan dan Pelatihan	1. Jumlah ASN yang mengikuti pelaksanaan pendidikan 2. Jumlah ASN yang telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh PPSPM Kementerian PKP	4.	Tingkat layanan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian PKP (%)	-	Indikator 4: Jumlah ASN di Kementerian PKP yang dikembangkan kompetensinya tiap tahunnya dibandingkan dengan target ASN yang akan dikembangkan kompetensinya (40%)			
SK-10	Meningkatnya kualitas pengelolaan pengembangan talenta	Tingkat layanan pengembangan talenta ASN Kementerian PKP			Komposit dari indikator-indikator sebagai berikut:		Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut:			Dihitung setiap tahun	Data Internal dan Eksternal
			KRO: EBA–Layanan Dukungan Manajemen Internal RO: EBA.962-Layanan Umum	1. Tingkat layanan administrasi keuangan, BMN, Tata Persuratan, Kearsipan, dan Kerumahtanggaan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia 2. Jumlah Dokumen Renstra dan Reviu Renstra Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia 3. Jumlah Perjanjian Kinerja Kepala Pusat-Kepala Bidang-Kepala Bagian di lingkungan Pusat Pengembangan	1.	Tingkat layanan umum	-	Indikator 1: (5%)			
								a.	Jumlah laporan terkait umum yang telah diselesaikan dibagi dengan jumlah total laporan yang wajib disusun (25%)		
								b.	Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja (20%)		
								c.	Nilai Evaluasi Implementasi AKIP Unit Kerja (20%)		
	d.	Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko Unit Kerja (10%)									



SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	KRO/RO	Output	SUB INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN		TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)
				Sumber Daya Manusia 4. Jumlah Rencana Aksi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia 5. Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulanan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia 6. Jumlah Laporan Kinerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia 7. Tingkat Layanan data dan informasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia 8. Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia 9. Jumlah Laporan Manajemen Risiko Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia						
			KRO: AFA–Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria RO: AFA.001-NSPK	Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pengembangan talenta yang telah tersusun	2.	Tingkat efektivitas penyusunan NSPK Pengembangan Talenta (%)	-	Indikator 2: Persentase NSPK bidang Manajemen Talenta yang telah disusun tepat waktu (25%)		



SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	KRO/RO	Output	SUB INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN		TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)
			Pengembangan Talenta							
			KRO: EBC–Layanan Manajemen SDM Internal RO: EBC.001-Penilaian, Pemetaan, dan Manajemen Kinerja	1. Jumlah Laporan Penilaian Kompetensi ASN yang terlaksana 2. Jumlah Laporan Pemantauan Kinerja ASN Kementerian PKP 3. Jumlah Laporan Pemetaan Kompetensi ASN di Lingkungan PKP	3.	Tingkat layanan pengelolaan penilaian kompetensi, pemetaan karier, dan manajemen kinerja (%)	-	Indikator 3: (70%)		
							a.	Persentase ASN yang dinilai kompetensinya dibandingkan dengan target ASN Kementerian PKP yang akan dinilai kompetensinya (35%)		
							b.	Persentase ASN yang dipantau kinerjanya dibandingkan dengan total ASN Kementerian PKP (35%)		
							c.	Persentase ASN yang dipetakan karirnya dibandingkan dengan total ASN Kementerian PKP (30%)		

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Matriks Kinerja dan Metode Perhitungan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029 tanggal 15 Mei 2025



An aerial photograph of a large-scale residential development, likely a public housing project. The image shows multiple long, parallel rows of small, uniform houses with dark roofs, arranged in a grid-like pattern. The houses are situated on a flat, cleared area. In the background, a body of water is visible, and further back, a range of mountains or hills rises under a cloudy sky. The entire image has a teal or blue color overlay. The text 'LAMPIRAN 3 MATRIKS KERANGKA REGULASI' is centered over the middle of the image.

LAMPIRAN 3 MATRIKS KERANGKA REGULASI

Matriks Kerangka Regulasi Sekretariat Jenderal Kementerian PKP

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
1	Rapermen PKP tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PKP	Peraturan ini merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	- Kementerian PANRB - Bappenas - Unit Organisasi/Unit Kerja/Satker/Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kementerian PKP	2025
2	Rapermen PKP tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian PKP	Mengantisipasi diperlukannya standar penyusunan Nota Kesepahaman/MoU dan PKS dalam upaya pengikatan komitmen kerja sama	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Unit Organisasi/Unit Kerja/Satker/UPT di Kementerian PKP	2025
3	Rapermen PKP tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PKP	Pedoman pembentukan UPT/Balai di Kementerian PKP, dengan mengacu pada PerMen PANRB No.PER/18/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	- Kementerian PANRB - Unit Organisasi/Unit Kerja/Satker/UPT di Kementerian PKP	2025
4	Rapermen PKP tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik	Peraturan ini merupakan turunan dari UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PP No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Biro Komunikasi Publik	Seluruh Unit Organisasi/Unit Kerja/UPT di Kementerian PKP	2025
5	Rapermen PKP tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Belum adanya ketentuan yang mengatur terkait dengan SPBE di Kementerian PKP, yang merupakan turunan dari UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), PerPres No.27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, PerPres No.95 Tahun 2018 tentang SPBE, PerPres No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia	Pusat Data dan Informasi	Seluruh Unit Organisasi/Unit Kerja/UPT di Kementerian PKP	2026
6	Rapermen PKP tentang Pengembangan Kompetensi	Diatur sebagai dasar pelaksanaan Pengembangan Kompetensi SDM yang mengacu pada PP No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Pusat Pengembangan SDM	Seluruh Unit Organisasi/Unit Kerja/UPT di Kementerian PKP	2025

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Matriks Kerangka Regulasi Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029 No.002/BA/Sr/2025 tanggal 10 Juni 2025 dan Nota Dinas Kepala Biro Hukum Nomor 786/ND/Sh/2025 tanggal 10 September 2025
deral Tahun 2025-2029 No.002/BA/Sr/2025 pada tanggal 10 Juni 2025





KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA